



7TH

ISU-ISU STRATEGIS DAN AGENDA PEMBANGUNAN RT RPJMN 2020-2024

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**Konsultasi Regional RPJMN 2020-2024
Wilayah Kalimantan
Balikpapan, 20 Agustus 2019**



OUTLINE PAPARAN

- ARAHAN PRESIDEN
- *HIGHLIGHT* ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL
- SKENARIO DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 5 TAHUN KE DEPAN
- ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN
- KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH WILAYAH KALIMANTAN
- TOPIK KHUSUS : PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA



ARAHAN PRESIDEN



ARAHAN PRESIDEN TERPILIH*

Pembangunan Infrastruktur

Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan

Pembangunan SDM

Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan *stunting*-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi, dan infrastruktur dasar untuk kesehatan dan produktivitas

Mendorong Investasi

Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya

Reformasi Birokrasi

Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin *simple*, semakin lincah, *mindset* berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga

Penggunaan APBN

Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat



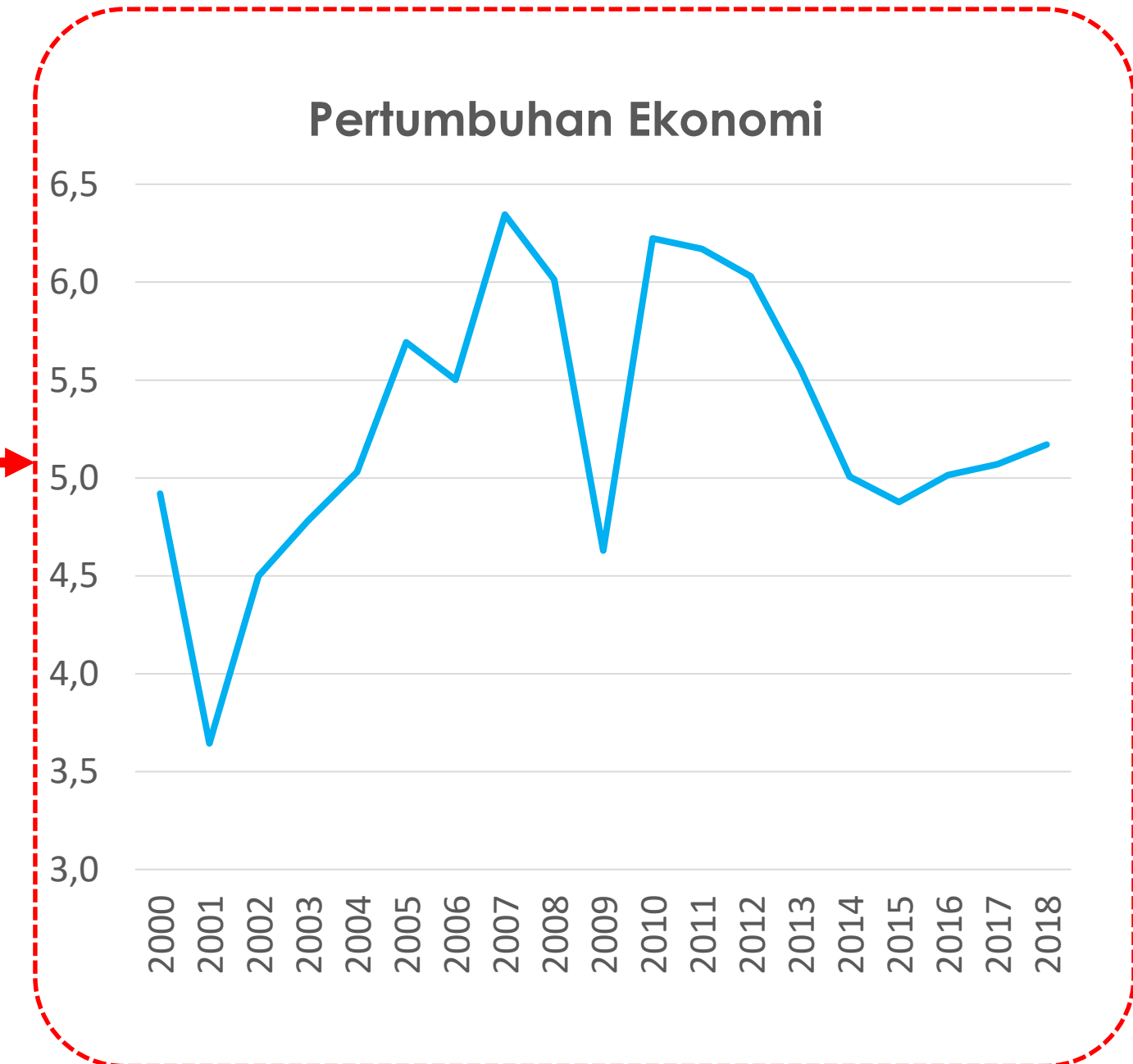
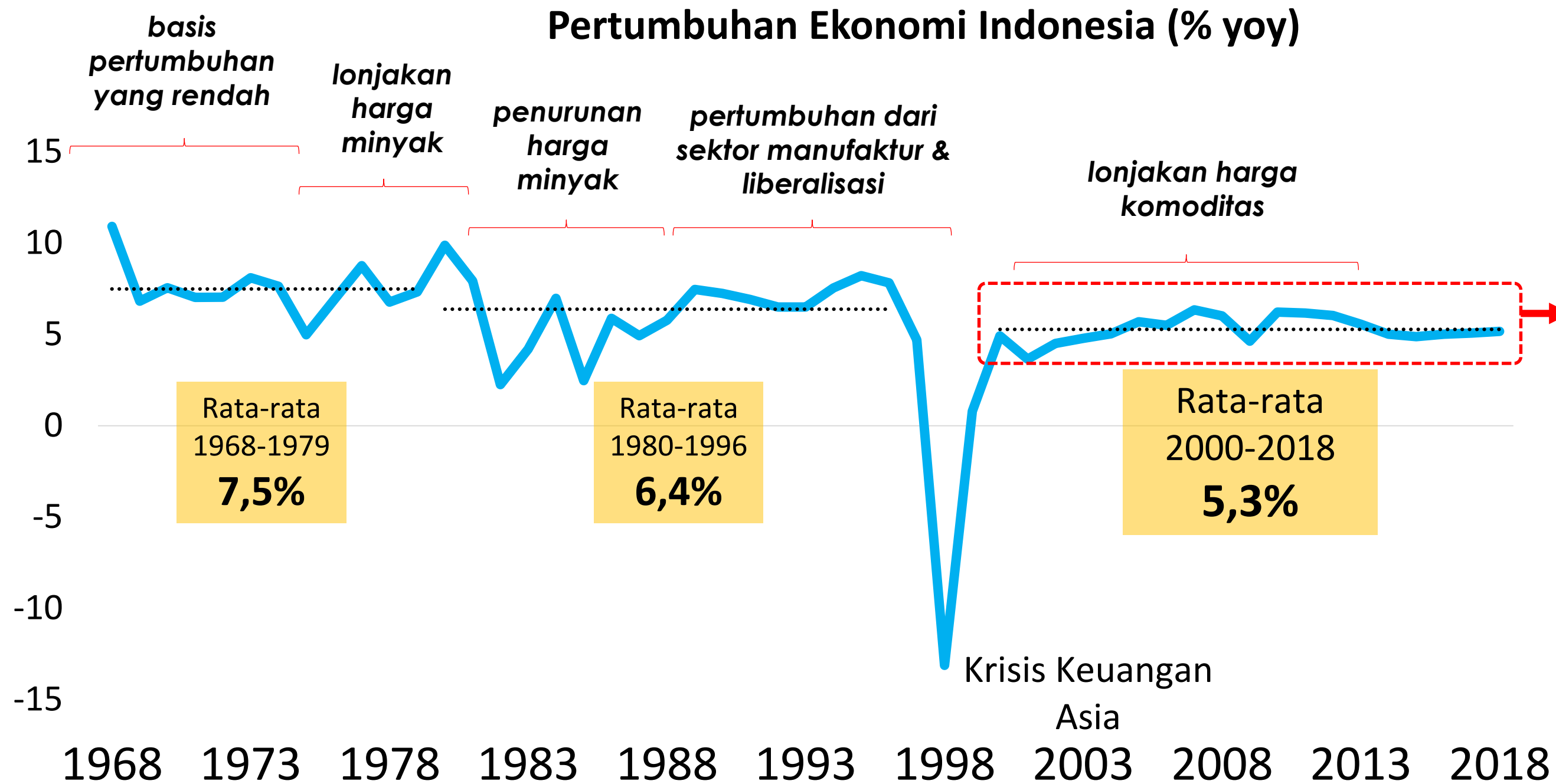
*) Disampaikan pada pidato Visi Indonesia di Sentul, Jawa Barat, 14 Juli 2019



HIGHLIGHT **ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL**



URGENSI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA



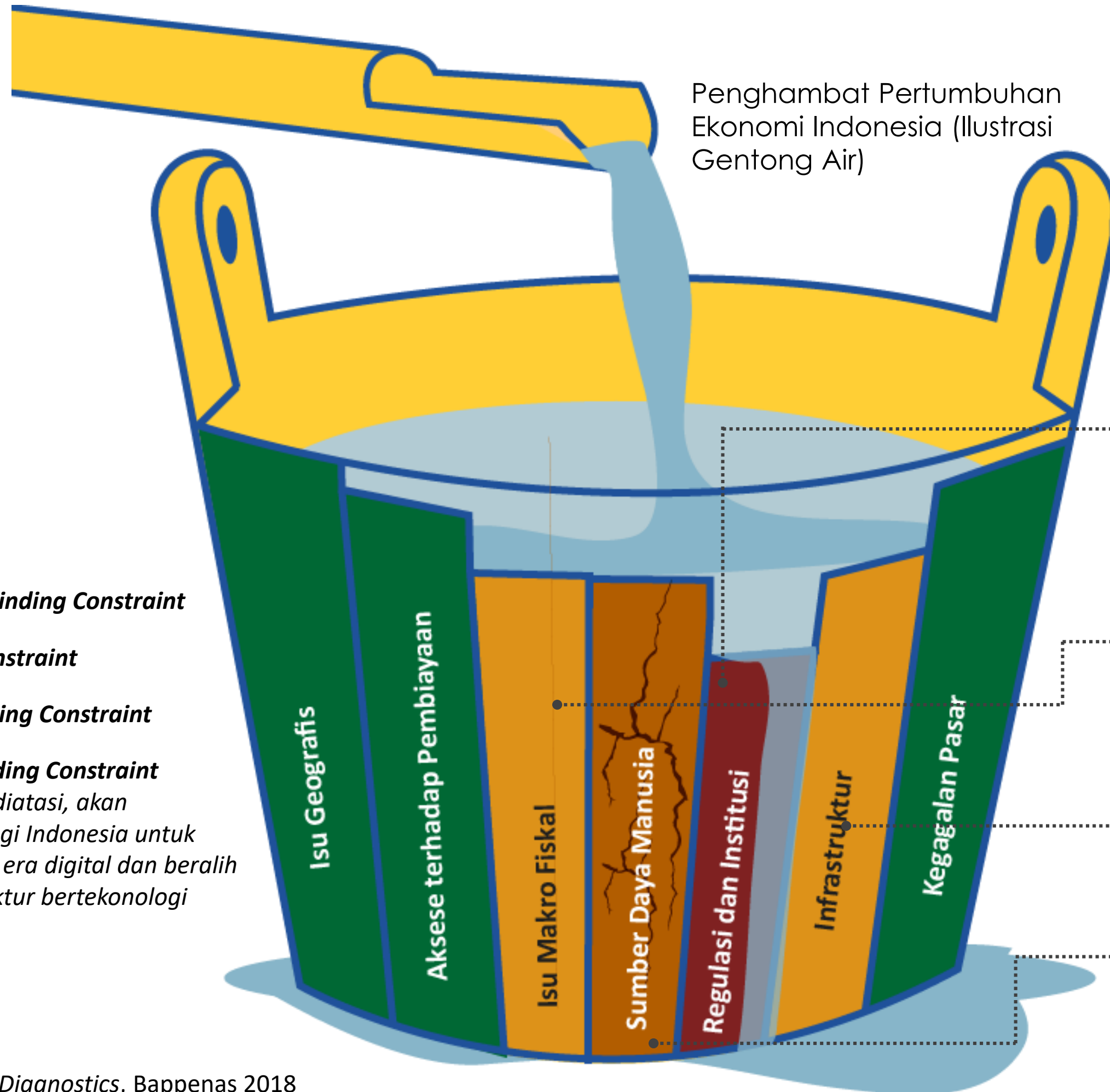
Sumber: BPS, CEIC (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia **melambat dan cenderung stagnan**

Memerlukan **upaya ekstra** untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia



PENGHAMBAT UTAMA EKONOMI TUMBUH TINGGI



- The Most Binding Constraint**
- Binding Constraint**
- Bukan Binding Constraint**
- Future Binding Constraint**
(Jika tidak diatasi, akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan beralih ke manufaktur berteknologi tinggi)

Regulasi dan Institusi adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi

- **Regulasi** tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, khususnya pada **regulasi**

Investasi

- Kualitas **institusi** rendah
 - Korupsi tinggi dan birokrasi tidak efisien
 - Lemahnya koordinasi antarkebijakan

Fiskal:
Rendahnya penerimaan perpajakan

Infrastruktur:
Kurang memadai, utamanya konektivitas

Sumber Daya Manusia menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang

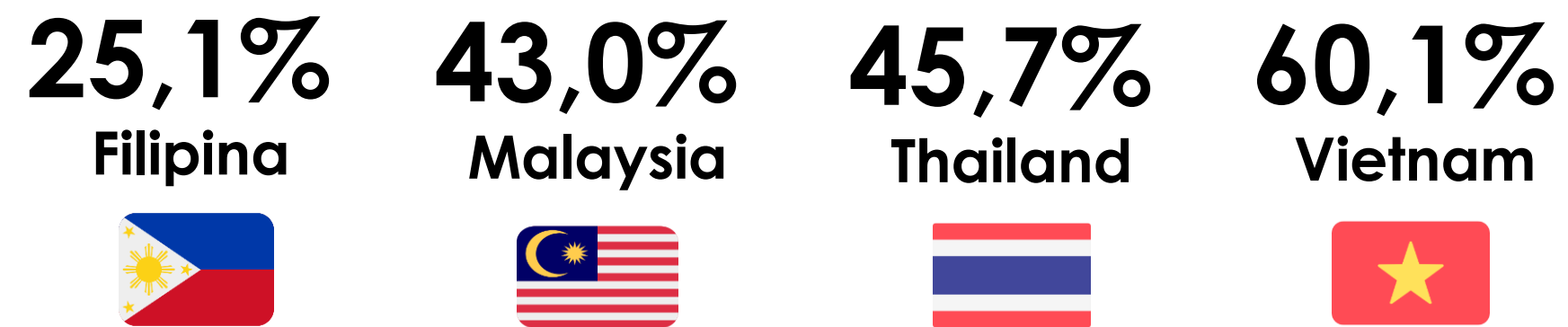
(Jika tidak diatasi saat ini, akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan beralih ke manufaktur berteknologi tinggi)



REGULASI INVESTASI PERLU DISEDERHANAKAN

Pembatasan terhadap investasi asing langsung (FDI) **mencegah terbentuknya bisnis di Indonesia yang dapat menarik teknologi dan mendorong ekspor.**

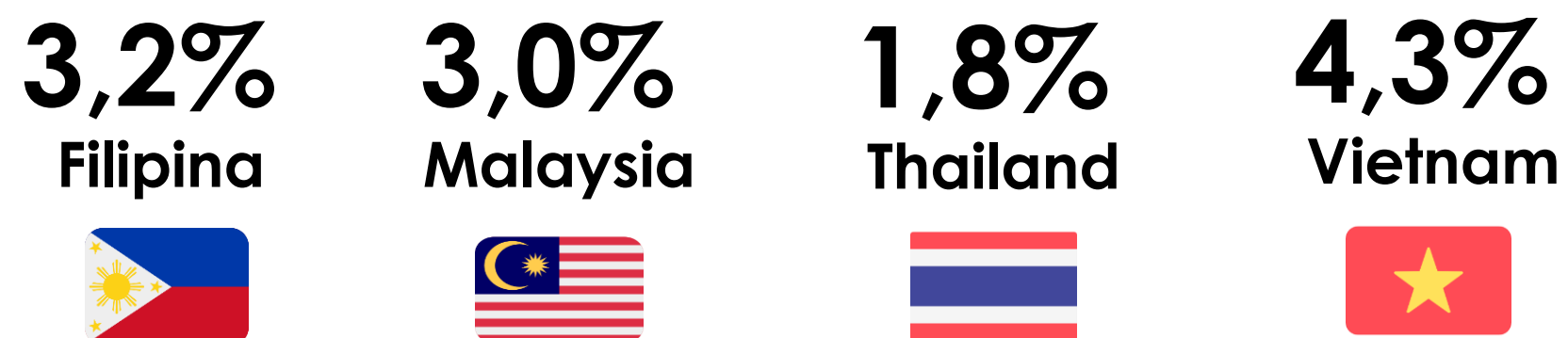
Stok investasi langsung Indonesia hanya **22,1%** dari PDB pada tahun 2018, dibandingkan...



Sumber: Country Fact Sheets 2019 – UNCTAD

Sementara itu, net investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar

2,1% dari PDB, dibandingkan...



Sumber: World Development Indicators (2017)

Pembatasan terhadap investasi asing mengakibatkan **hilangnya 8% investasi berorientasi ekspor yang masuk ke Indonesia.**

Dampak lain dari pembatasan investasi asing adalah **rendahnya upah tenaga kerja Indonesia sebesar 15% dari yang seharusnya.**

Sumber: Indonesia Economic Quarterly (IEQ) World Bank, Desember 2018

Regulasi investasi sektor jasa di Indonesia **lebih restriktif dibandingkan rata-rata negara G20.**

Regulasi investasi Indonesia di **21 dari 22 subsektor jasa** lebih restriktif dari rata-rata negara G20.

5 subsektor [legal, distribution (wholesale, retail services), logistics - freight transport, construction, maritime transport] Indonesia memiliki regulasi yang **paling restriktif.**

Sumber: Services Trade Restrictiveness Index 2018 - OECD

Contoh sukses relaksasi peraturan investasi:

Relaksasi DNI industri film pada tahun 2016 berdampak pada semakin **berkembangnya produsen film domestik, munculnya 600 layar bioskop baru, dan meningkatnya jumlah penonton sebesar 200%** dalam tiga tahun.

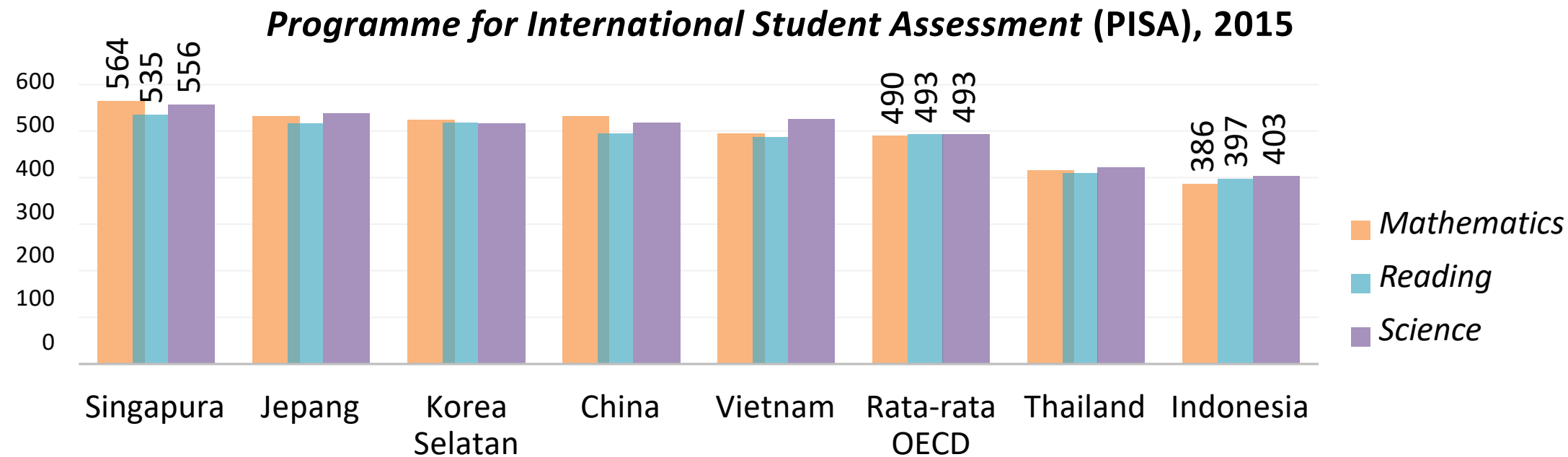


Sumber: Bloomberg (2019)



PERBAIKAN SUMBER DAYA MANUSIA : PENDIDIKAN

Tingkat partisipasi sekolah di Indonesia tinggi, **namun kualitas pendidikan masih sangat rendah.**



Berdasarkan skor PISA 2015, kemampuan matematika, membaca, dan sains pelajar Indonesia **tertinggal jauh** dari negara tetangga dan rata-rata negara OECD.

Sumber: PISA, OECD (2016)

Akibatnya, **keahlian dasar tenaga kerja di Indonesia sangat rendah.**

Sebagai perbandingan, keahlian tenaga kerja lulusan **Pendidikan Tinggi di Indonesia** setara keahlian tenaga kerja lulusan **SMA ke bawah di Denmark.**

Sumber: *The Need for a Pivot to Learning: New Data on Adult Skills from Indonesia* - Pritchett (2016)

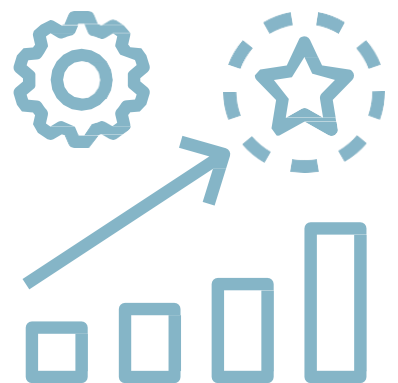
Berdasarkan hasil historis PISA, peningkatan kualitas pendidikan Indonesia sangat lambat.

Diperkirakan **Indonesia baru dapat mencapai skor rata-rata OECD pada tahun 2065.**

Sumber: *LEARNING to Realize Education's Promise* – World Development Report (WDR) 2018, World Bank



Peningkatan skor PISA setiap pelajar menjadi rata-rata **420 atau setara Thailand saat ini** akan meningkatkan **0,6% pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia** selama 2020- 2060 dari *baseline*.

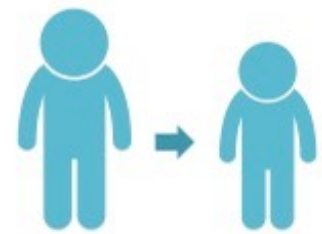


Sumber: OECD Economic Surveys Indonesia, Oktober 2018



PERBAIKAN SUMBER DAYA MANUSIA: KESEHATAN

Meskipun mengalami perbaikan signifikan seperti peningkatan usia harapan hidup, **beberapa capaian indikator kesehatan Indonesia masih rendah dan tertinggal** dibandingkan negara sebanding. Hal ini berpengaruh pada **produktivitas tenaga kerja dalam jangka panjang**.



3 dari 10 anak di bawah usia 5 tahun **menderita stunting**

Sumber: UNICEF, WHO (2016)

Akses air minum dan sanitasi yang masih rendah (61,29% dan 74,58%) menjadi salah satu penyebab *stunting*



75



99



97

Hanya **75 dari 100** anak Indonesia mendapat **imunisasi campak**



23 dari 100 remaja laki-laki usia 13-15 tahun **merokok**

Sumber: WHO (2018), diolah

26 dari 100 kematian penduduk usia 30-70 tahun disebabkan oleh **4 penyakit tidak menular**: kanker, diabetes, kardiovaskular (CVD), atau pernafasan kronis (CRD) dibandingkan...

17

di Malaysia, Vietnam, dan China



15

di Thailand



Sumber: World Development Indicators (2016), diolah

Fasilitas kesehatan Indonesia masih sangat tertinggal:



Tenaga Kesehatan
per 10.000 Penduduk*

3,7

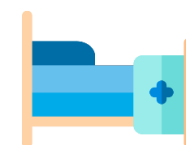
15,1

8,2

8,1



Sumber: WHO
*Indonesia & Thailand (2017), Vietnam (2016), Malaysia (2015)



Tempat Tidur Rumah Sakit
per 10.000 Penduduk**

12

19

26

21

Sumber: World Development Indicators
**Indonesia & Malaysia (2015), Vietnam (2014), Thailand (2010)



SKENARIO DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN



SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI 2020-2024



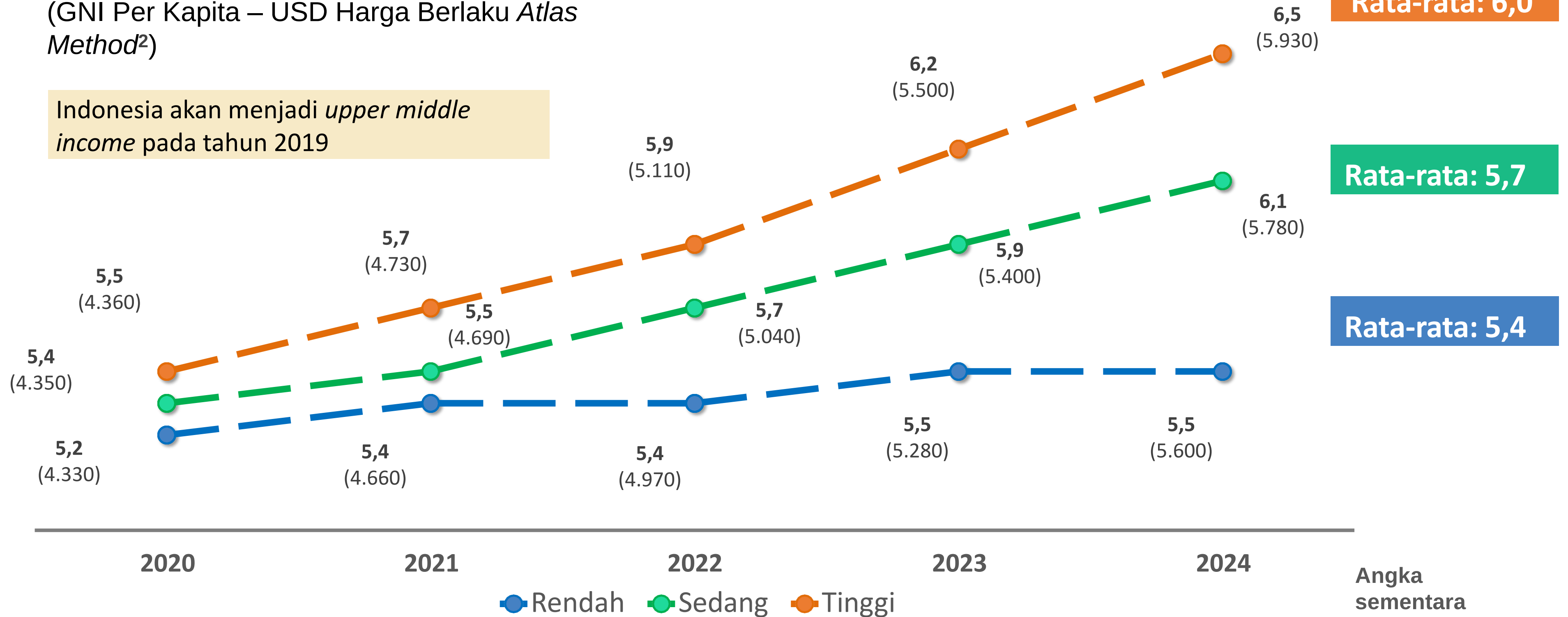
Kunci peningkatan pertumbuhan¹:

1. Peningkatan produktivitas
- 2. Peningkatan investasi**
3. Perbaikan kualitas SDM
4. Perbaikan pasar tenaga kerja

Pertumbuhan Ekonomi - Persen

(GNI Per Kapita – USD Harga Berlaku *Atlas Method*²)

Indonesia akan menjadi *upper middle income* pada tahun 2019



¹ Berdasarkan simulasi Bappenas Juni 2019 (Angka Sementara) dengan metode Growth Accounting

² Metode yang digunakan oleh Bank Dunia untuk mengelompokkan negara berdasarkan pendapatan



TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024



Pertumbuhan Ekonomi
(persen)

5,4 - 6,0



Tingkat Kemiskinan
(persen)

6,5 – 7,0



Gini Rasio
(indeks)

0,370 – 0,374



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(persen)

4,0-4,6



Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) (nilai)

75,54



7 AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024



Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas



Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan



Meningkatkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing



Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan



Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar



Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim



Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik

Pendanaan RPJMN 2020-2024 disusun dengan memperkuat implementasi *Money Follows Program* dengan 3 strategi utama :

1 Memperkuat kualitas alokasi pada Prioritas



- Memperkuat integrasi pendanaan untuk prioritas
- Fokus pada pendanaan prioritas khususnya *Major Project*

2 Memperbesar Kapasitas Pendanaan



- Diperkirakan Belanja K/L hanya dapat mendanai 20-25% seluruh kebutuhan pembangunan
- Mendorong peran BUMN, KPBU, dan Masyarakat
- Mendorong inovasi skema pendanaan (*creative financing*) antara lain PINA, *Blended Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah

3 Memperkuat *Delivery Mechanism*



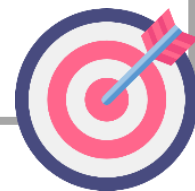
- Menyusun rencana program pembangunan hingga tingkat proyek dan *Major Project* sebagai alat kendali



MAJOR PROJECT

- Pelaksanaan RT RPJMN 2020-2020 diperkuat dengan penyusunan *Major Project 2020-2024* untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (*delivery mechanism*)
- *Major Project* memuat proyek-proyek strategis yang terintegrasi dengan melibatkan K/L; Pusat – Daerah – BUMN – Masyarakat

38 Major Projects Nasional disusun memiliki **Nilai Strategis** dan **Daya Ungkit** Untuk Mencapai Sasaran Prioritas



MAJOR PROJECT Kalimantan a.l:



Pemindahan ibu kota negara baru



Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin



Pengembangan Waduk Multiguna



Pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan



PKSN Paloh Aruk dan PKSN Nunukan



KERANGKA REGULASI & KELEMBAGAAN DALAM RPJMN 2020-2024

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITUJUKAN UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

NO.	AGENDA PRORITAS PEMBANGUNAN	KERANGKA REGULASI (TINGKAT UU)	KERANGKA KELEMBAGAAN
1	Manusia	12	3
2	Ekonomi	11	6
3	Kewilayahan	5	2
4	Infrastruktur	1	1
5	Politik, Hukum, dan Pertahanan	20	5
	TOTAL	49	17

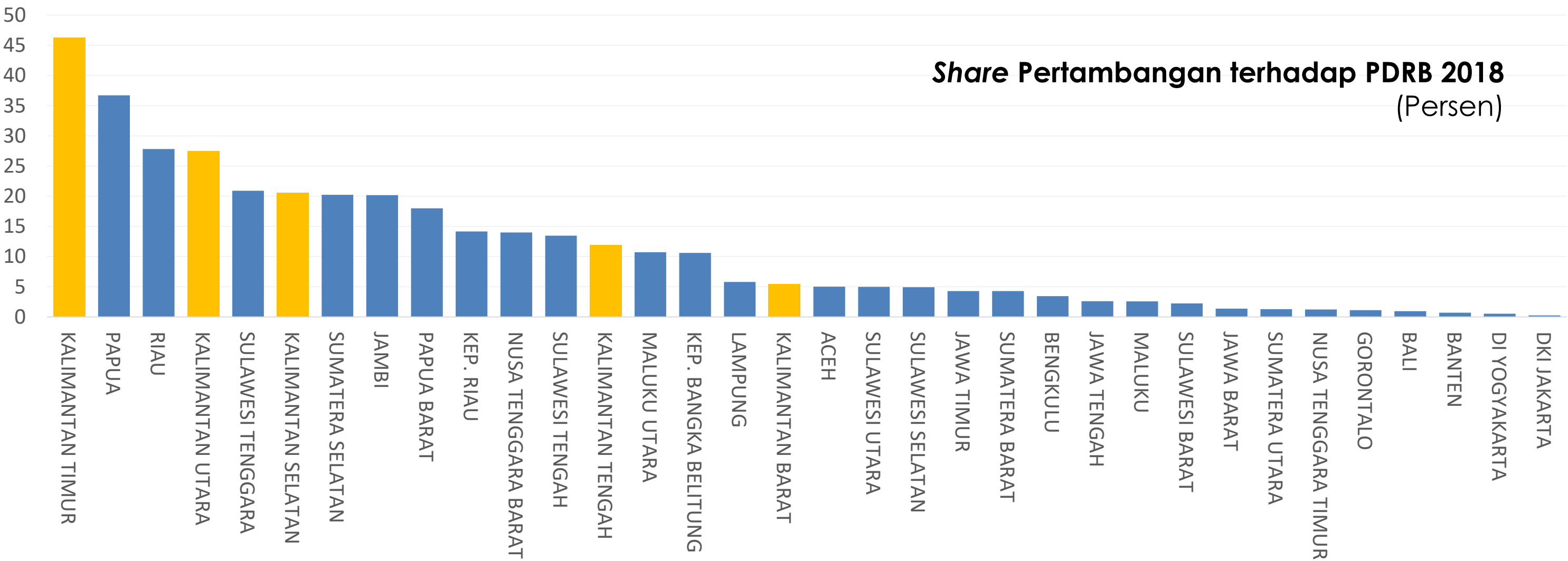
BEBERAPA ISU PRIORITAS		KELEMBAGAAN	KERANGKA REGULASI &
	Infrastruktur	➔	Regulasi dan/atau kelembagaan mendukung Isu Infrastruktur
	Vokasi	➔	Regulasi dan/atau kelembagaan mendukung Isu Vokasi
	Ibu dan Anak serta Stunting	➔	Regulasi mendukung Isu Ibu dan Anak serta <i>Stunting</i>
	Investasi dan Regulasi Perizinan	➔	Regulasi dan/atau kelembagaan mendukung Isu Investasi dan Perizinan
	Reformasi Birokrasi	➔	Regulasi mendukung Isu Birokrasi
	Low Carbon Development Indonesia (LCDI) dan Kebencanaan	➔	Regulasi mendukung Isu LCDI dan Kebencanaan



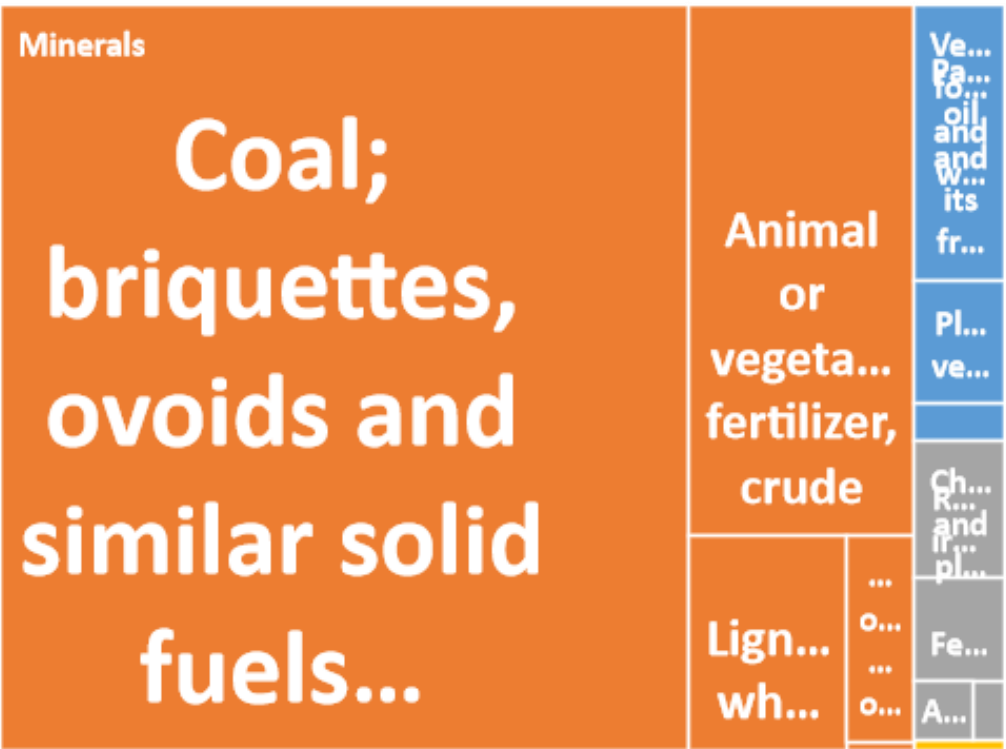
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN



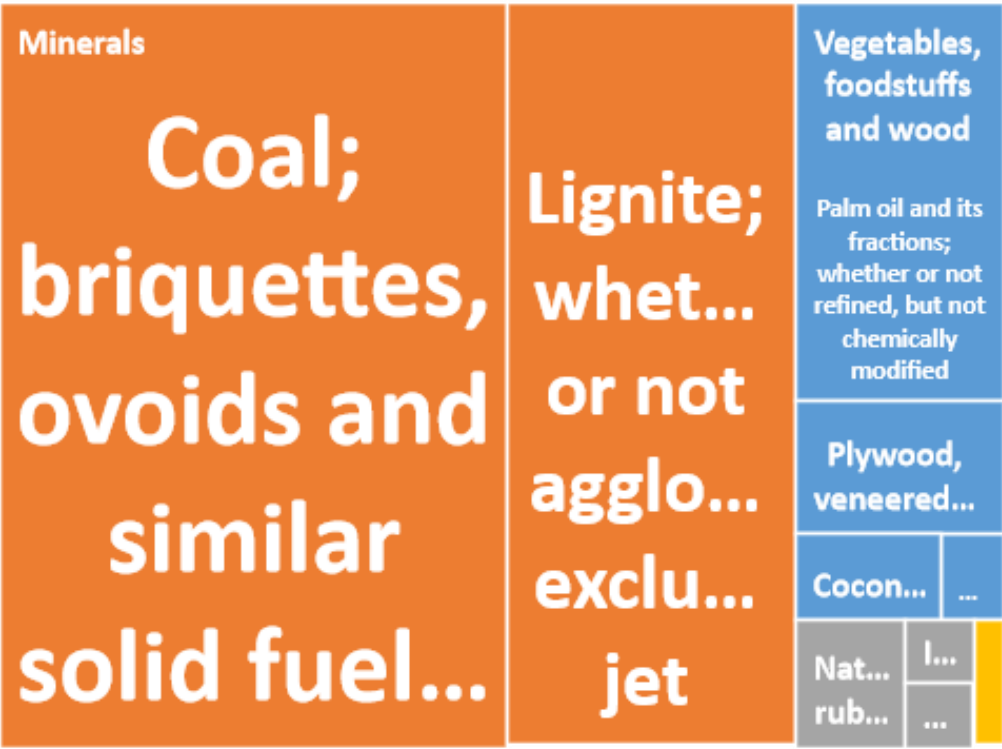
KETERGANTUNGAN PADA SEKTOR TAMBANG TINGGI (utamanya: Batubara)



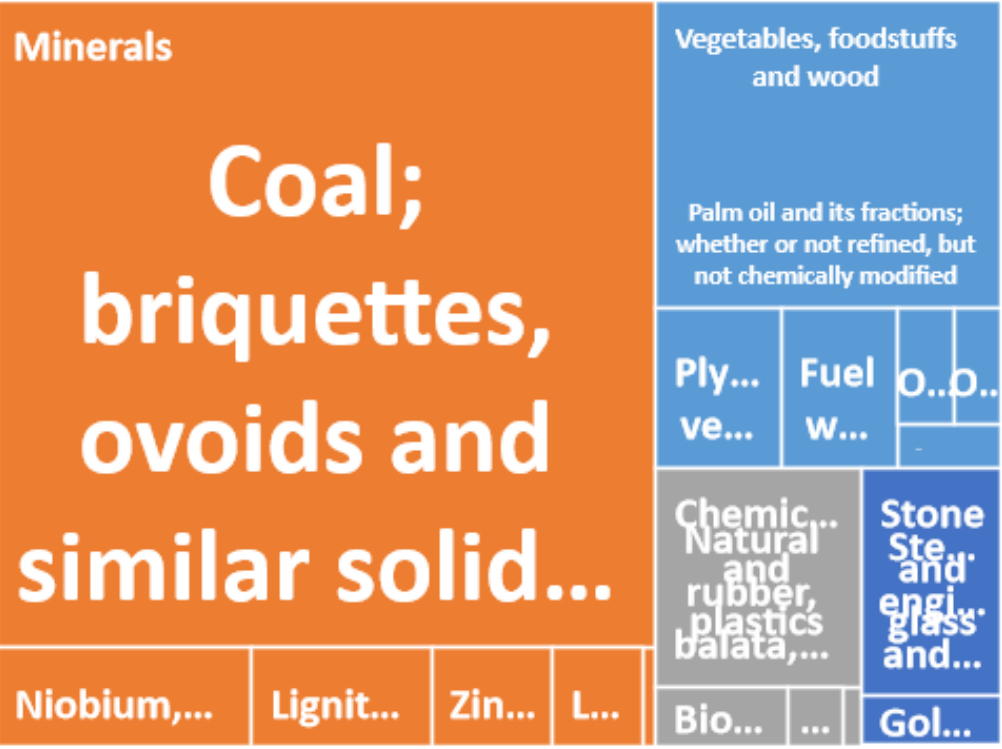
KALIMANTAN TIMUR, 2018
TOTAL EKSPOR: 18,6 MILIAR USD



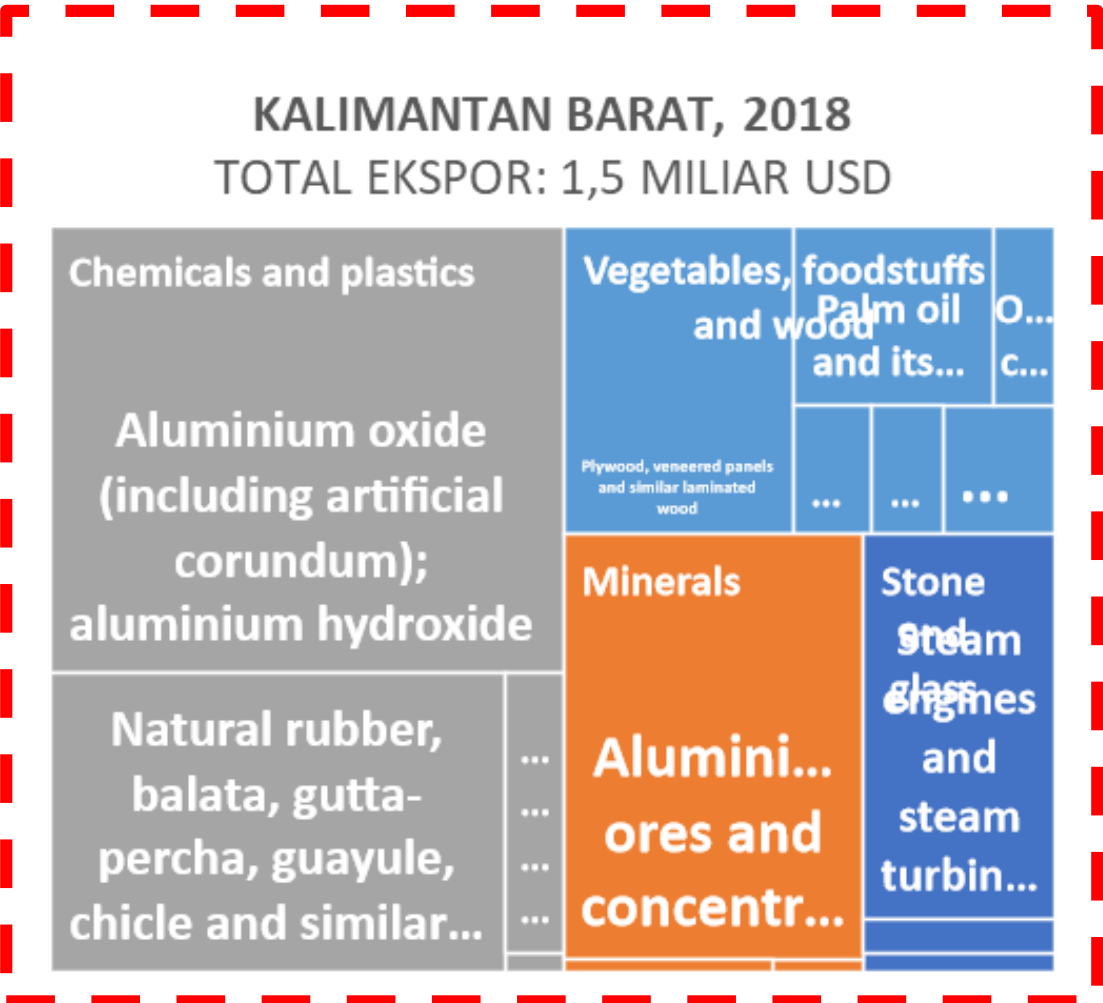
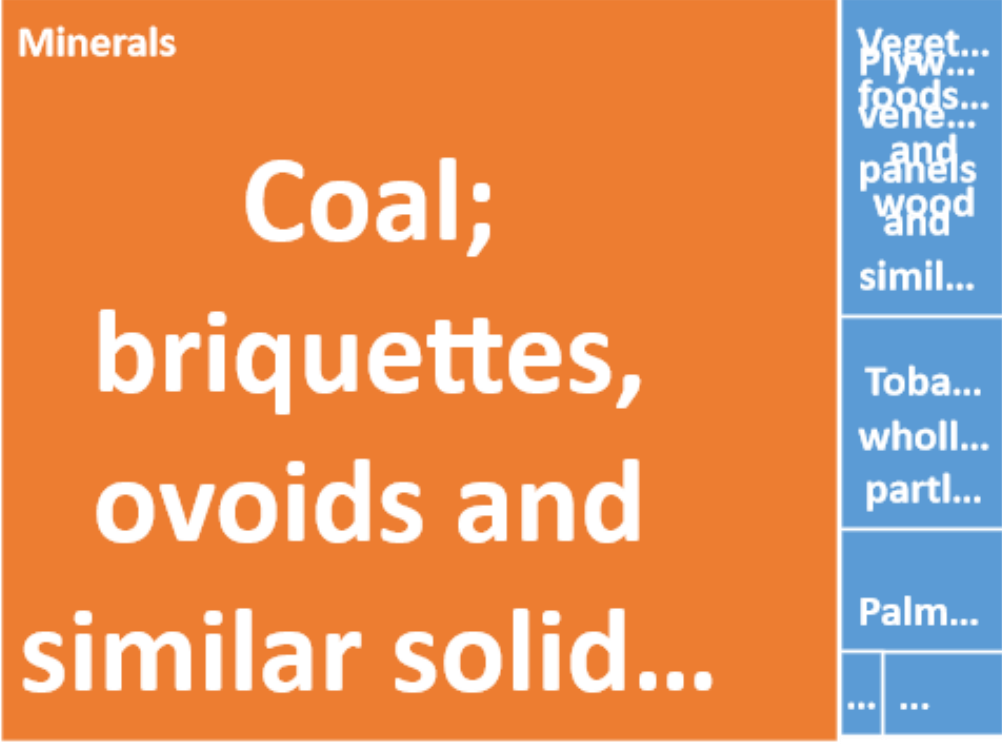
KALIMANTAN SELATAN, 2018
TOTAL EKSPOR: 8,2 MILIAR USD



KALIMANTAN TENGAH, 2018
TOTAL EKSPOR: 1,9 MILIAR USD



KALIMANTAN UTARA, 2018
TOTAL EKSPOR: 1,2 MILIAR USD

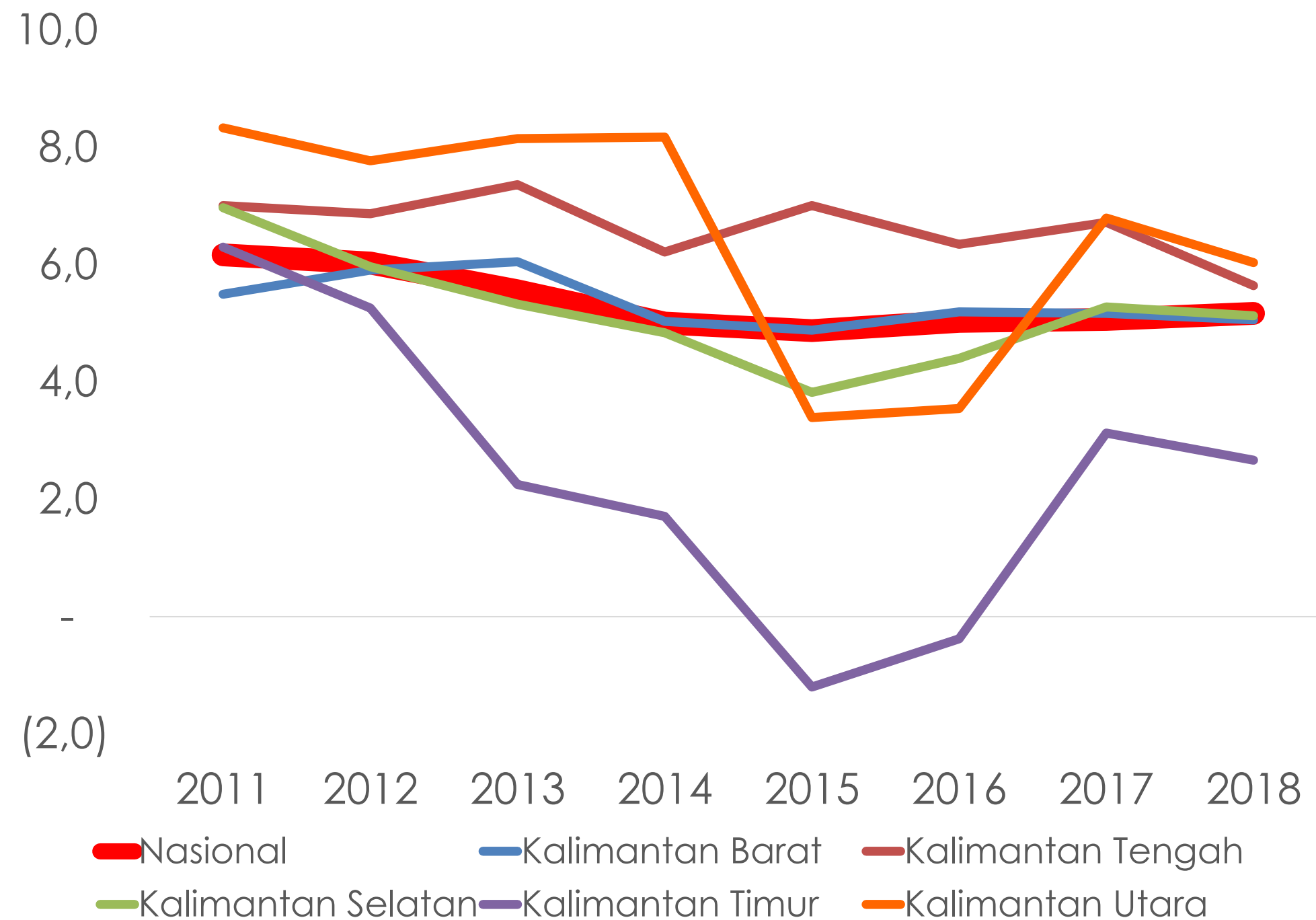




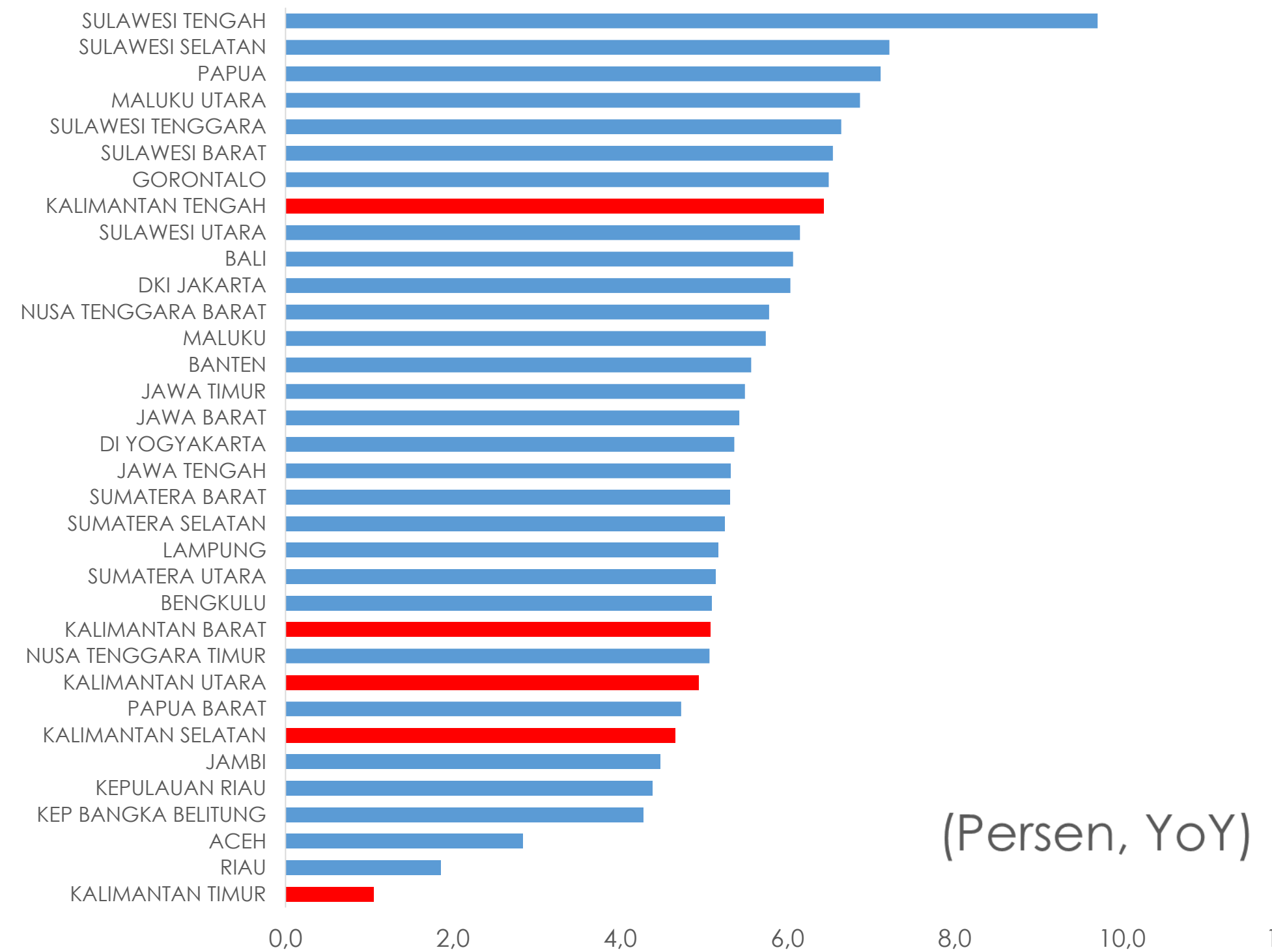
IMPLIKASI KETERGANTUNGAN TERHADAP SDA : PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN RENDAH DIBANDINGKAN PROVINSI LAIN PASCA COMMODITY BOOM

- Dinamika pertumbuhan ekonomi sebagian besar provinsi di Kalimantan mengikuti **dinamika harga komoditas internasional**.
- Pasca berakhirnya **era commodity boom pada tahun 2013-2014**, pertumbuhan ekonomi provinsi di **Kalimantan menurun**.

Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Prov di Kalimantan dan Nasional
(Persen, YoY)



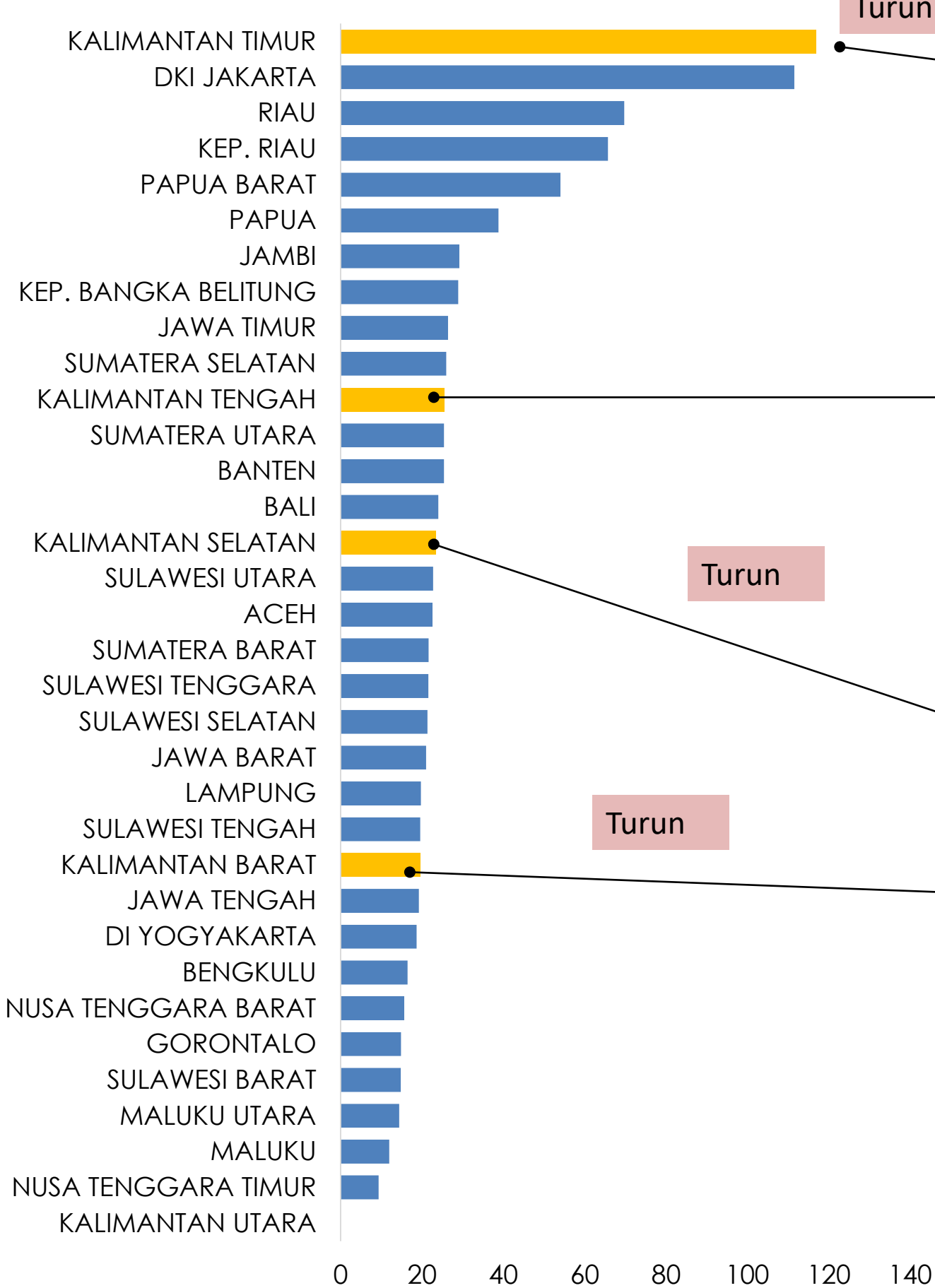
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Provinsi 2015-2018



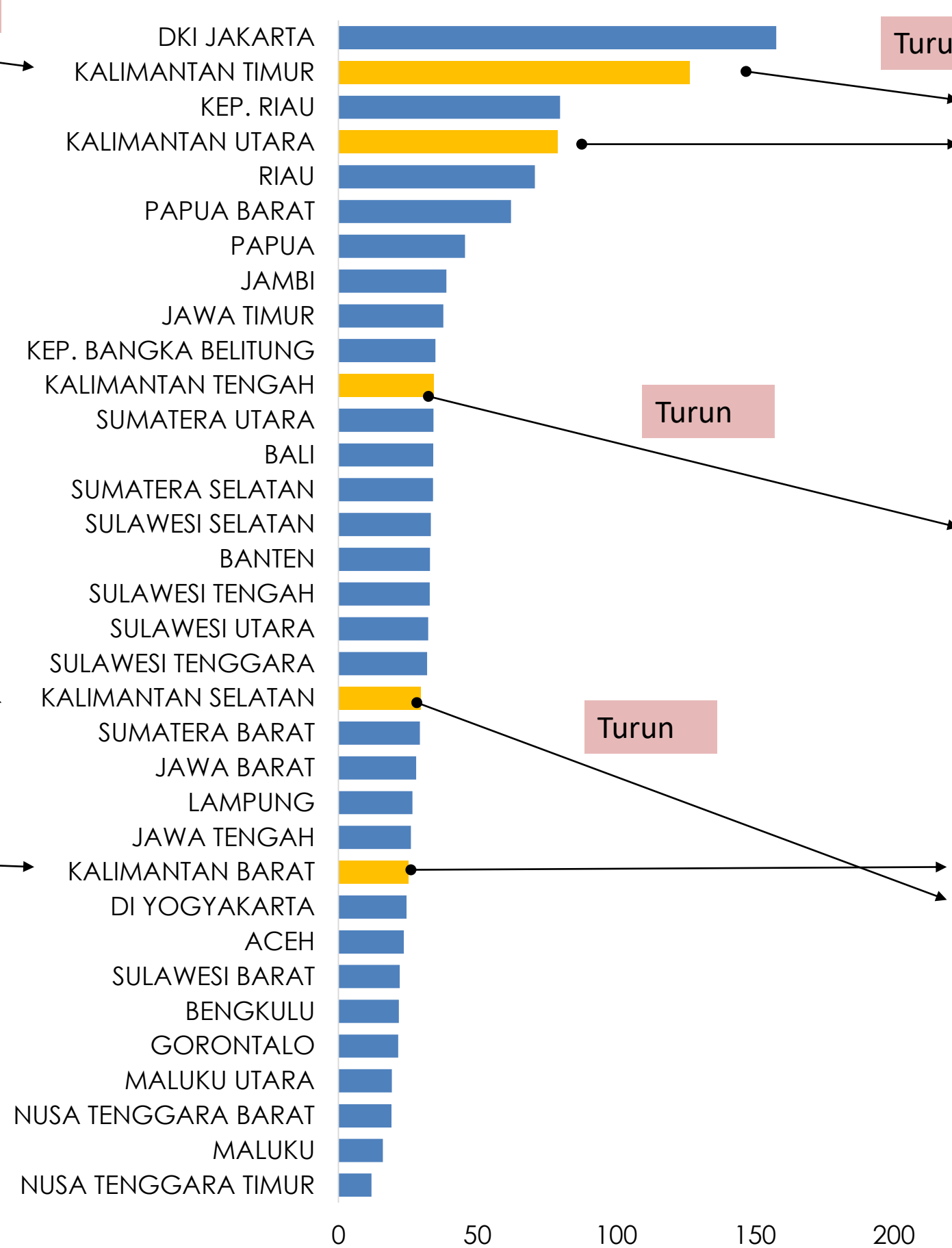


PENURUNAN PDRB PER KAPITA SETELAH ERA COMMODITY BOOM (2013-2014)

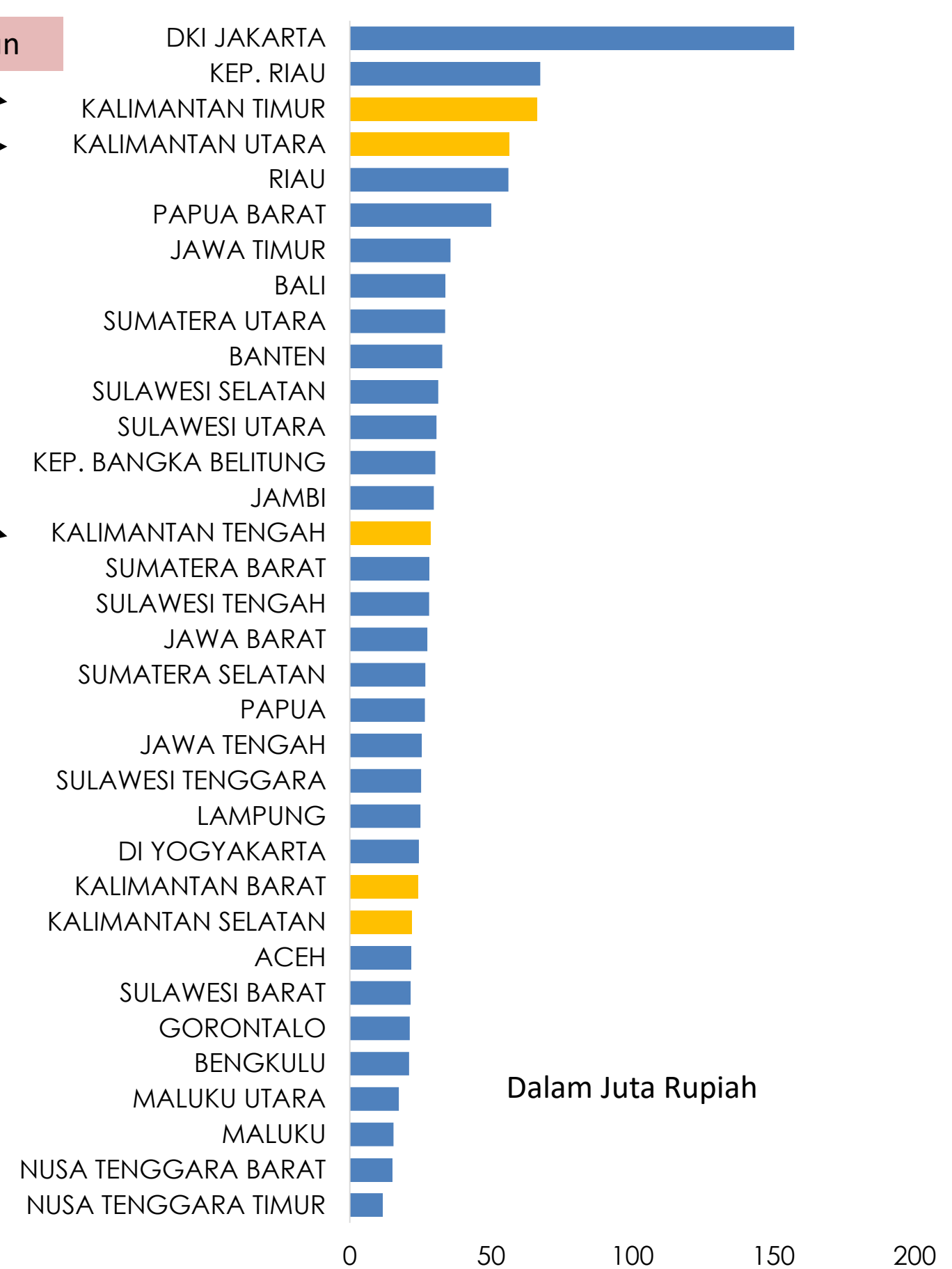
PDRB per Kapita 2010



PDRB per Kapita 2017



PDRB Tanpa Tambang per Kapita 2017



Dalam Juta Rupiah

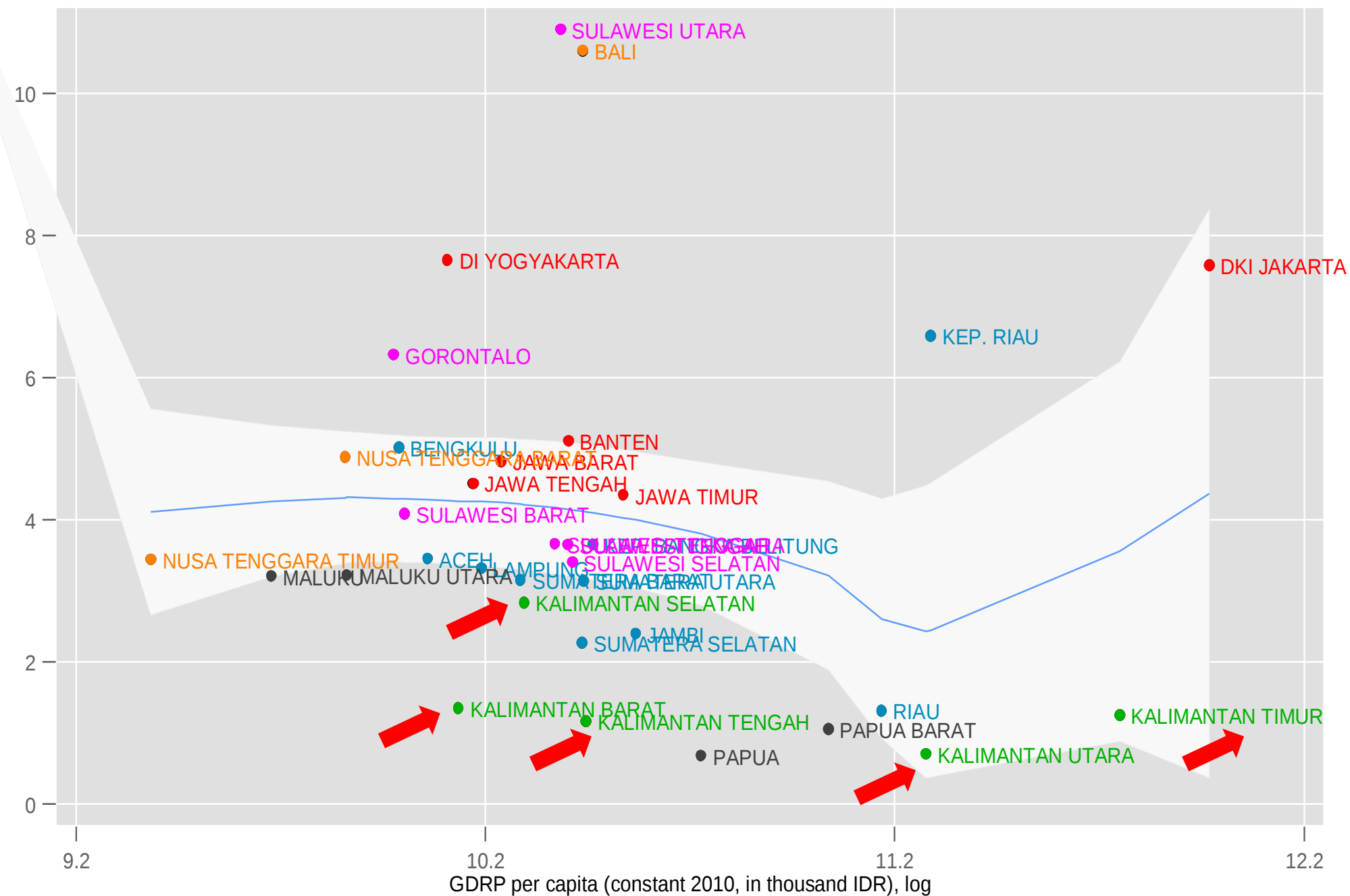


INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAN ENERGI MASIH TERKENDALA

Kualitas infrastruktur jalan di seluruh provinsi Kalimantan di bawah rata-rata provinsi Indonesia

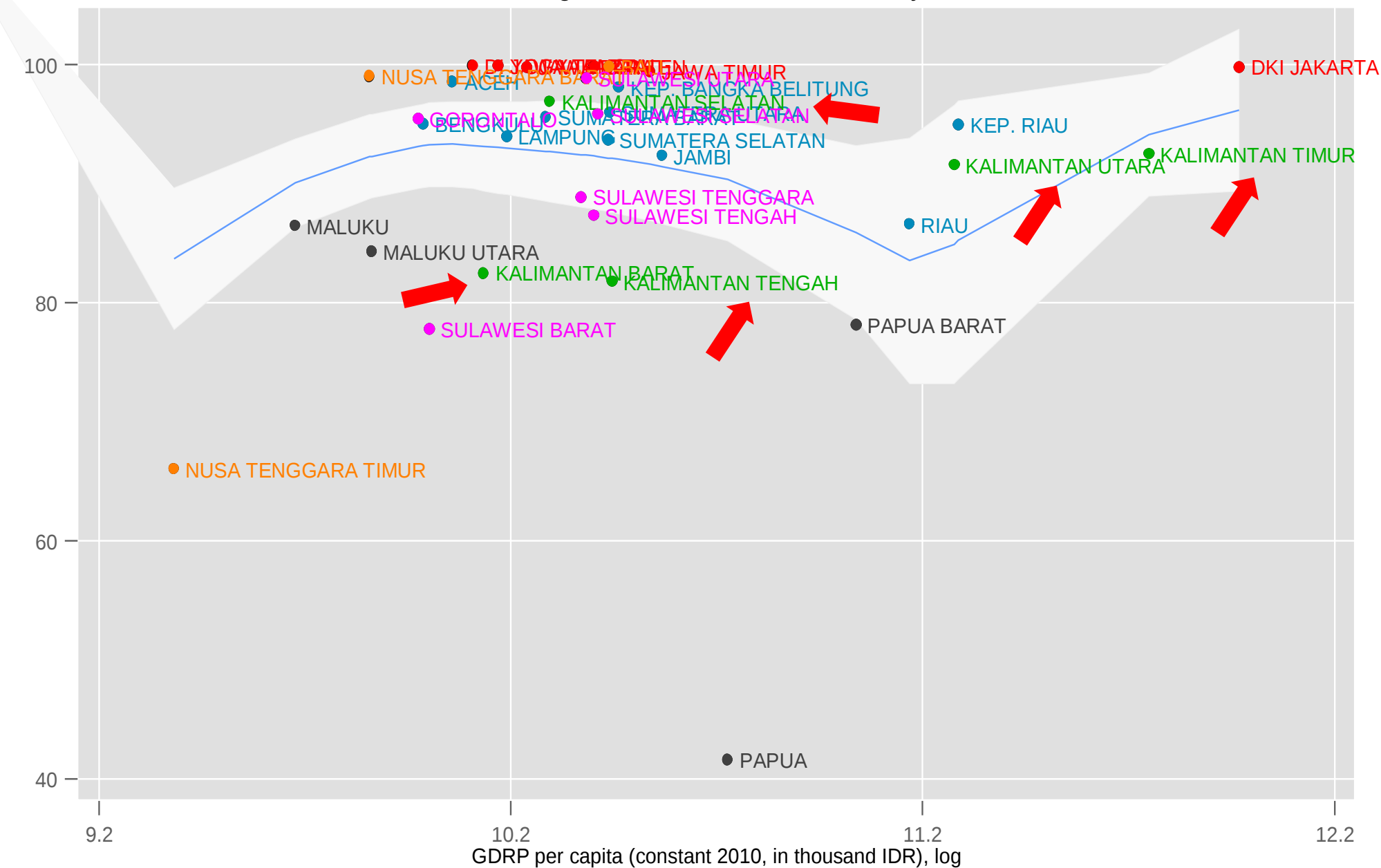
Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih di bawah rata-rata

Ratio of Road with Good and Medium Condition to Total Area, 2017



Data source: BPS

Percentage of Household with Electricity, 2017



Data source: BPS



KEANDALAN LISTRIK DI PROVINSI KALIMANTAN MASIH TERKENDALA

Keandalan/reliabilitas listrik masih rendah, ditandai dengan relatif tingginya gangguan dan banyaknya industri yang memiliki pembangkit listrik sendiri

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)

Rasio Jumlah Energi (KWh) yang Dihasilkan Sendiri terhadap Seluruh Energi yang Dipakai per Perusahaan 2015 (%)



SAIFI = Jumlah pelanggan terkena gangguan x jumlah gangguan / jumlah seluruh pelanggan

SAIFI
2,96 48,9

Powered by Bing
© GeoNames, MSFT, Microsoft, Navteq, Wikipedia



Sumber: IBS 2015

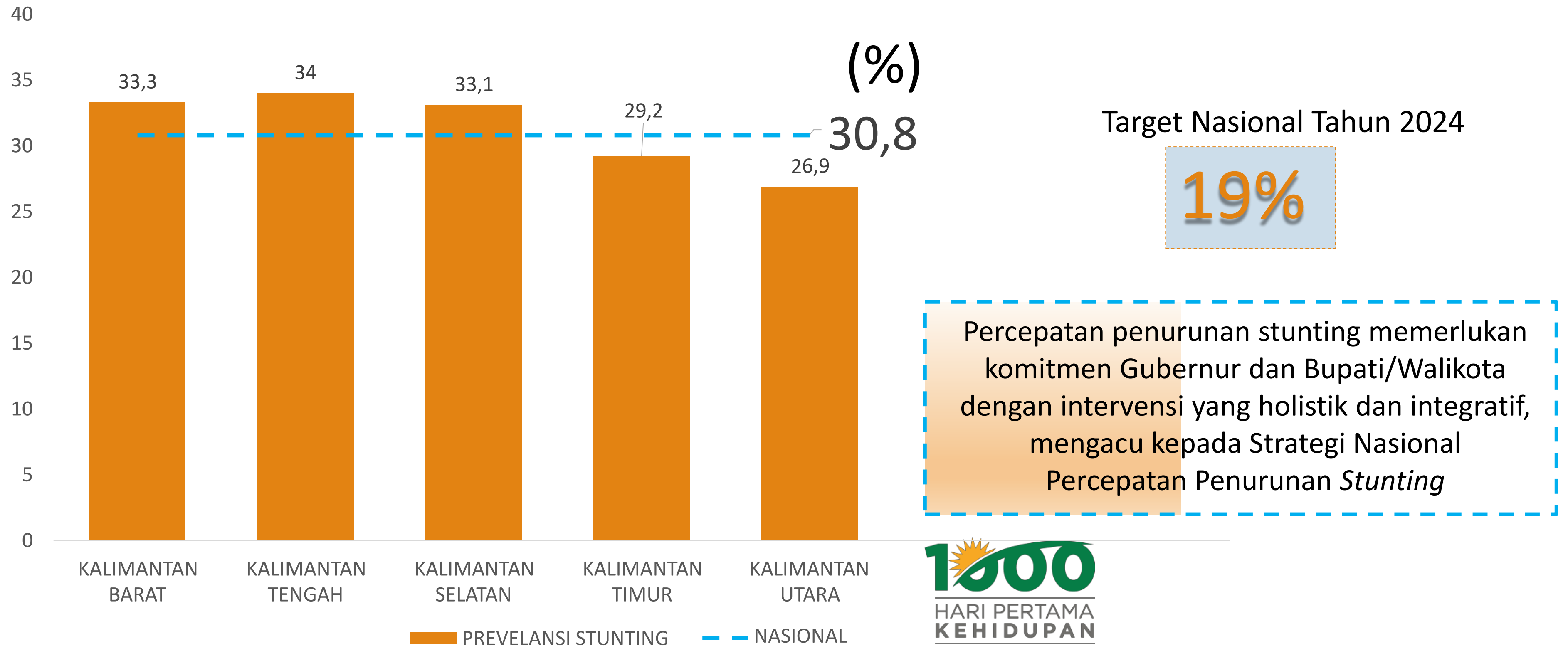
Series1
1,459938 76,92336

Powered by Bing
© GeoNames, MSFT, Microsoft, Navteq, Wikipedia



REPUBLIK
INDONESIA

STUNTING PADA ANAK BALITA DI WILAYAH KALIMANTAN TINGGI

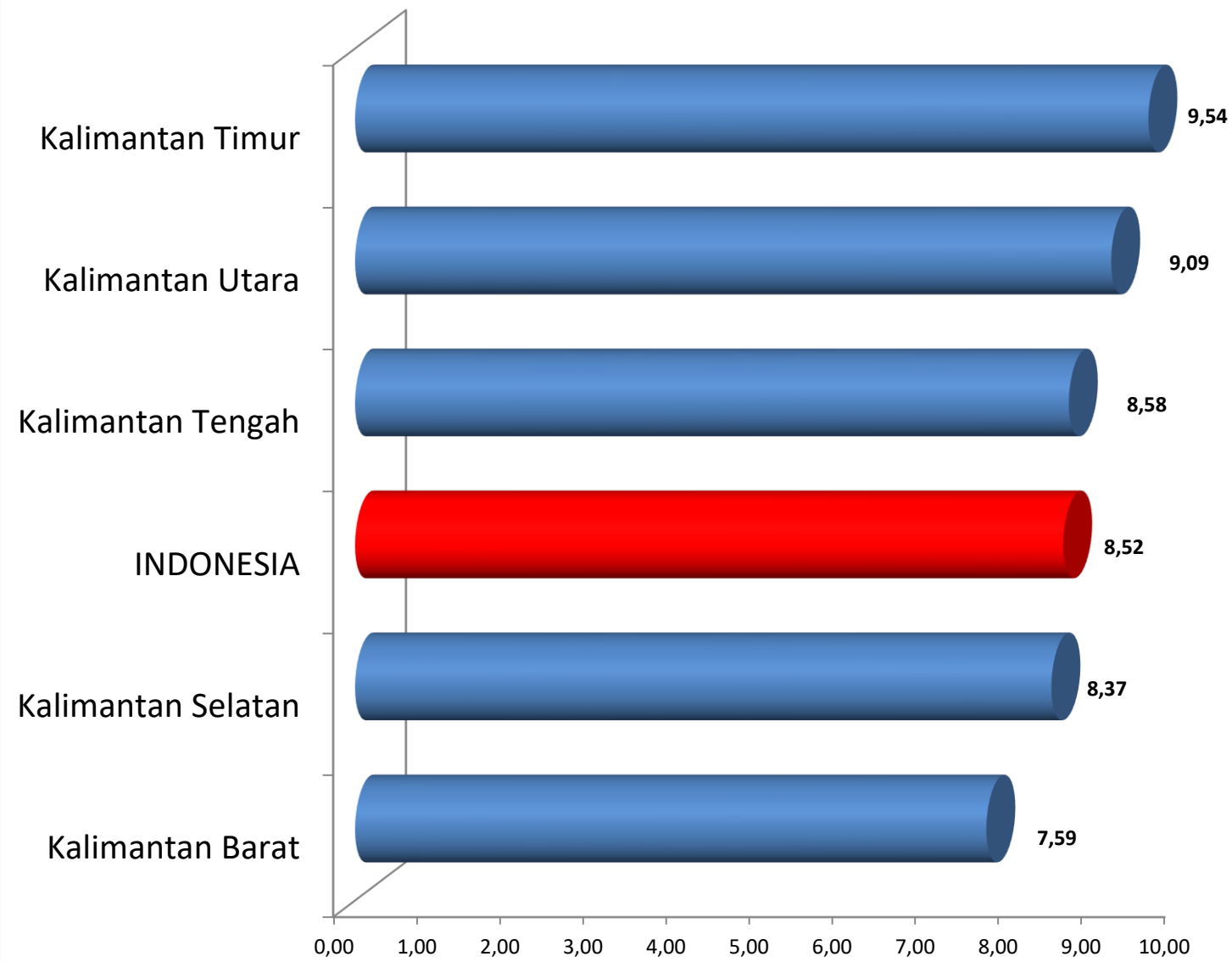




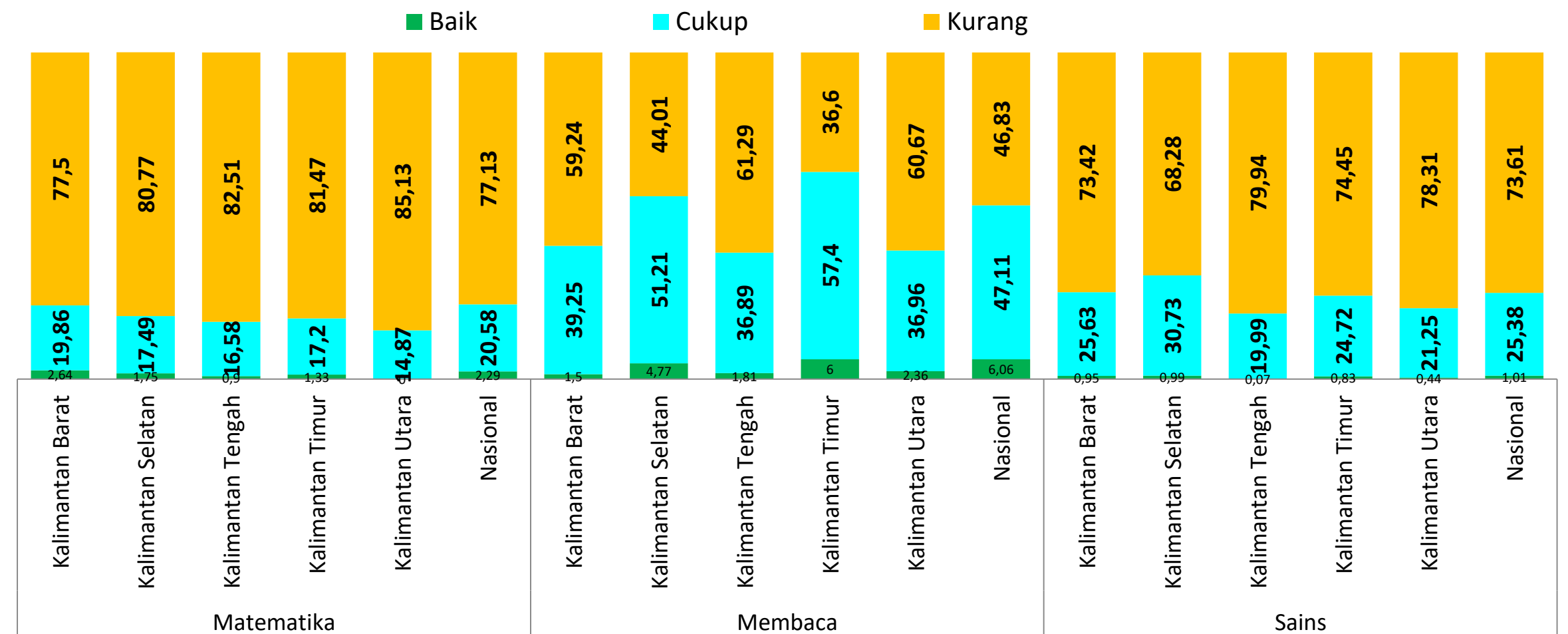
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DAN KUALITAS DI KALIMANTAN BELUM MERATA

Tingkat Pendidikan Penduduk yang Belum Merata

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

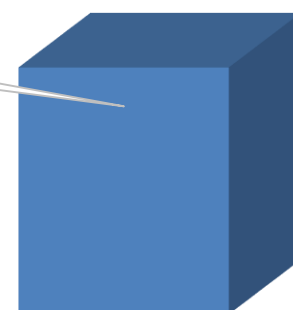


Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran Belum Optimal dan Merata



Sebaran Anak Usia Sekolah yang Tidak Mendapatkan Layanan Pendidikan

Kalbar; 118.845



Kalteng; 53.579



Kalsel; 83.409



Kaltim; 35.794



Kaltara; 12.014



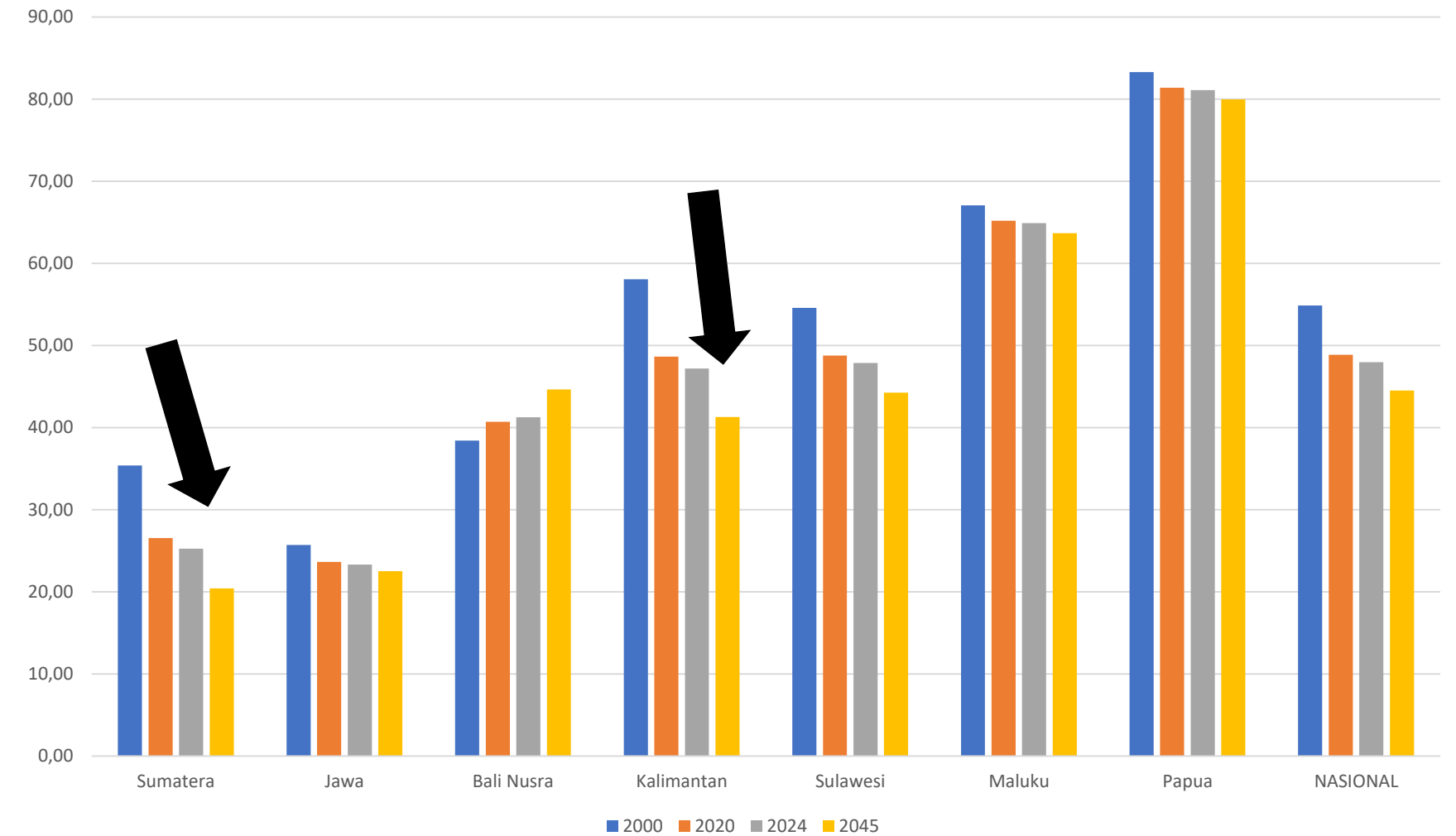


LAJU DEFORESTASI TUTUPAN HUTAN (%)



	Sumatera	Jawa	Bali Nusra	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Papua	NASIONAL
2000	35.37	25.69	38.41	58.07	54.57	67.07	83.29	54.88
2020	26.55	23.62	40.70	48.63	48.76	65.20	81.40	48.87
2024	25.25	23.32	41.24	47.20	47.85	64.91	81.10	47.97
2045	20.42	22.52	44.64	41.28	44.24	63.67	79.98	44.51

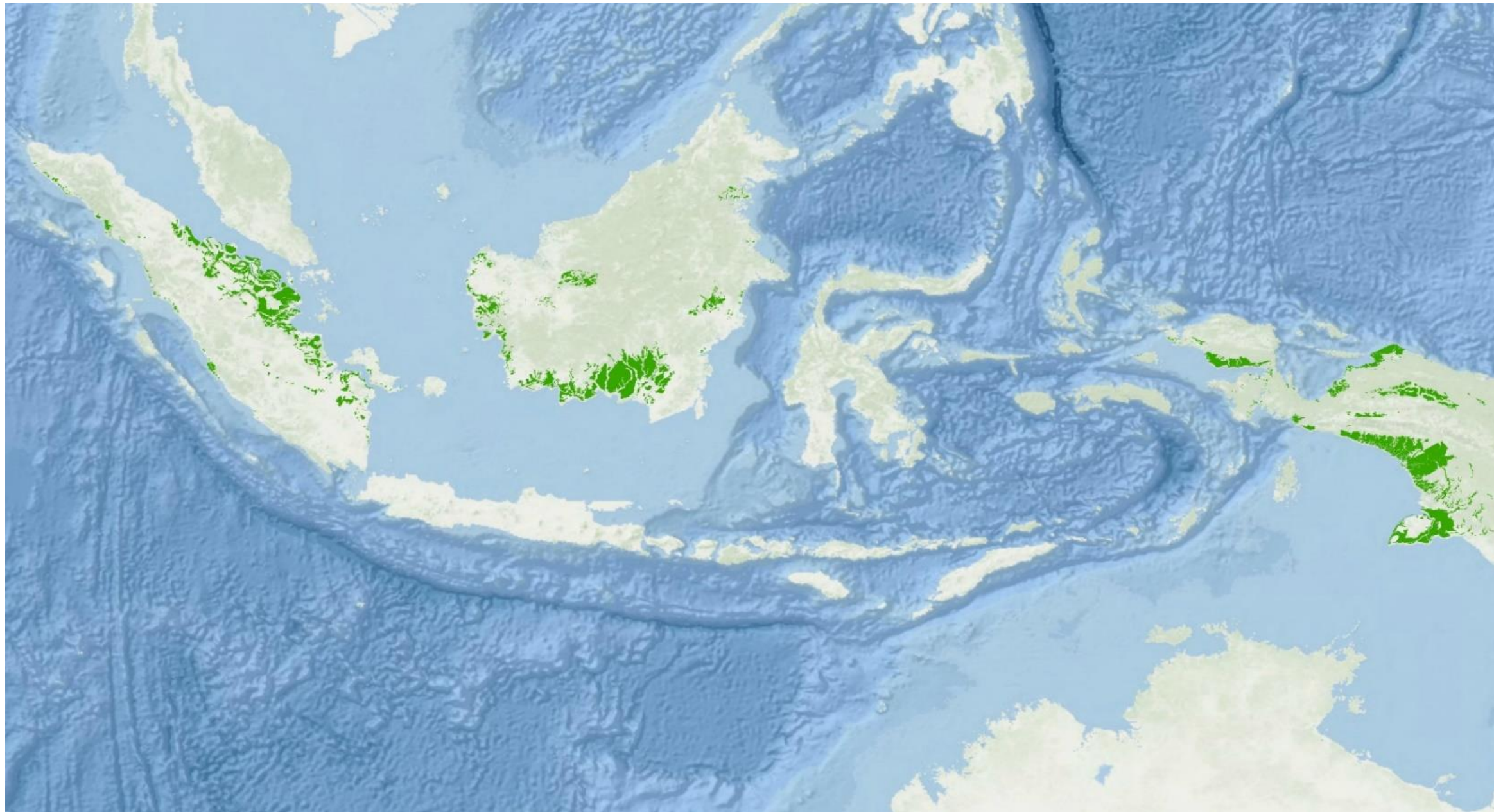
Sumber: KLHS RPJMN 2020-2024 (Bappenas, 2019)
Tutupan hutan termasuk hutan Primer, Sekunder dan Tanaman



- Laju deforestasi tertinggi sejak tahun 2000 didominasi oleh **Pulau Sumatera dan Kalimantan** dengan penurunan **-10,12%** dan **-10,88%** di tahun 2024. Penurunan ini akan terus berlanjut hingga **-14,95%** dan **- 16,79%** di tahun 2045.
- Adapun penurunan jumlah tutupan lahan ini diakibatkan oleh adanya kompetisi lahan pertanian dan perkebunan termasuk **sawit** yang menjadi komoditas utama dalam mendorong perekonomian nasional.
- Tanpa intervensi kebijakan, berdasarkan tren histori, tutupan lahan hutan di tahun 2045 secara nasional akan menurun drastis ke angka **44,51%**



ALIH FUNGSI HUTAN GAMBUT



- Alih fungsi hutan gambut pada periode 2000 hingga 2015, di Kalimantan mencapai 15 % lebih dan di Sumatera 20 %
- Moratorium lahan gambut baru dimulai dari tahun 2015.

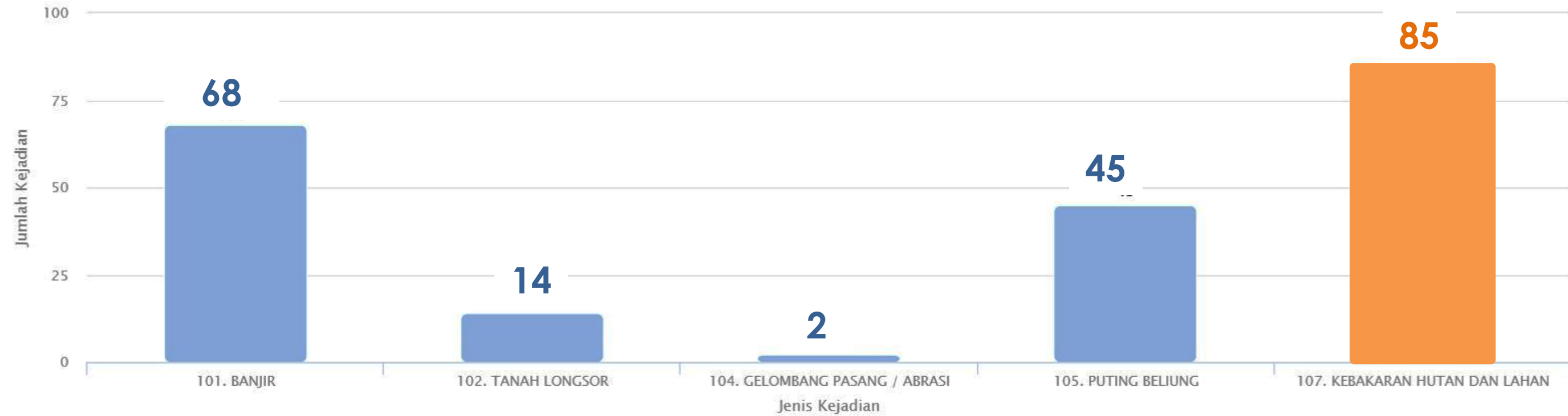
Pulau	Luas Kawasan (Ha)	Luas Tutupan Hutan di Atas Lahan Gambut			
		2000		2015	
		Ha	%	Ha	%
Sumatera	4.120.325	1.789.500	43,43	837.675	20,33
Kalimantan	4.694.625	2.545.300	54,22	1.871.800	39,87
Papua	6.376.975	4.896.300	76,78	4.817.275	75,54

*Sumber: KLHS RPJMN
2020-2024 (Bappenas,
2019)*



DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2015-2019

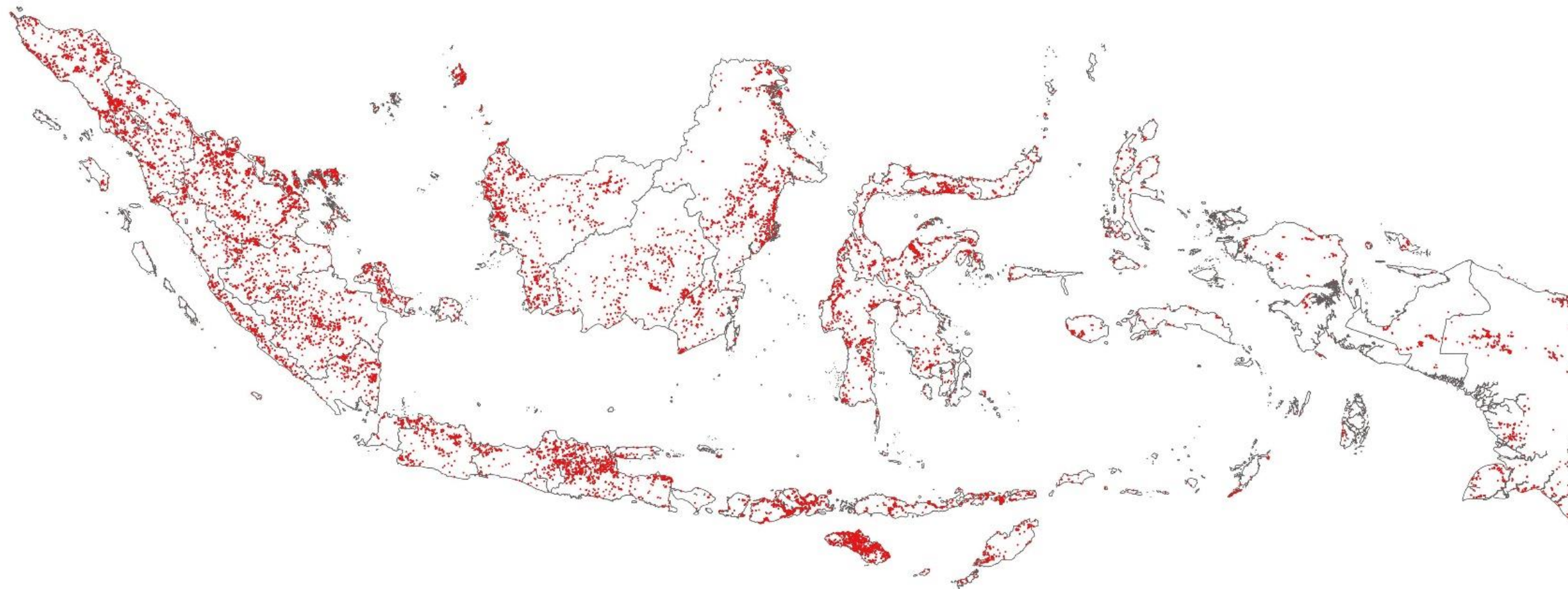
PULAU KALIMANTAN



Sumber: DIBI BNPB, 2019

- Selama tahun 2015-2019 tercatat 214 kejadian bencana yang terjadi di **Pulau Kalimantan**. Jenis bencana yang banyak terjadi adalah **kebakaran hutan dan lahan (85 kasus)**.
- Pulau Kalimantan memiliki **titik panas terbanyak** serta wilayah **kebakaran hutan dan lahan terluas** di Indonesia.
- Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana**, khususnya untuk bencana kebakaran hutan dan lahan harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kalimantan.

Titik Api Selama Januari Hingga Juli 2019



Sumber: Yayasan Madani Berkelanjutan, 2019

Provinsi	Jumlah Titik Panas	Luas (Ha)
Kalimantan Barat	558	3.315
Kalimantan Selatan	62	4.670
Kalimantan Tengah	100	3.618
Kalimantan Timur	105	4.430
Kalimantan Utara	36	859



HIGHLIGHT REGULASI DAERAH YANG MENGHAMBAT PERIZINAN DAN INVESTASI

No	Provinsi	Perda	Analisis
1.	Kalimantan Barat	• Perda Prov. Kalimantan Barat No. 2/2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	• Perda belum mengatur mekanisme penggabungan izin usaha obat hewan (importir, eksportir, produsen) dan sertifikat cara pembuatan obat yang baik sesuai dengan Online Single Submission.
		• Perda Kab. Pontianak No. 15/2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	• Perizinan masih dilakukan secara manual karena Perda belum terintegrasi dengan Online Single Submission
2.	Kalimantan Tengah	• Perda Prov. Kalimantan Tengah No. 5/2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015 - 2035	• Perda belum mengatur mekanisme ganti rugi tanah adat bagi masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan yang sedianya akan diatur dalam Peraturan Gubernur.
		• Perda Kota Palangkaraya No. 13/2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi	• Perizinan masih dilakukan secara manual karena Perda belum terintegrasi dengan Online Single Submission.
3.	Kalimantan Selatan	• Perda Prov. Kalimantan Selatan No. 2/2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan Berkelanjutan	• Perda belum mengatur mekanisme penggabungan Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), dan Izin Usaha Pengolahan (IUP-P) sesuai dengan Online Single Submission.
		• Perda Kota Banjarmasin No. 10/2011 tentang Pajak Hiburan	• Perda multitafsir karena menurut putusan MK No. 52 Tahun 2011, golf tidak dapat dikenakan pajak hiburan.
4.	Kalimantan Timur	• Perda Prov. Kalimantan Timur No. 1/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	• Perda multitafsir karena belum mengatur mekanisme perizinan yang lebih fokus misalnya perlindungan mangrove, terumbu karang, dan hutan hujan sesuai dengan Online Single Submission.
		• Perda Kota Banjarmasin No. 10/2011 tentang Pajak Hiburan	• Perizinan masih dilakukan secara manual karena Perda belum terintegrasi dengan Online Single Submission.
5.	Kalimantan Utara	• Perda Prov. Kalimantan Utara No. 5/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2017 – 2037	• Perda inkonsisten karena belum mengacu pada mekanisme perizinan pada regulasi di atasnya sehingga menimbulkan mekanisme perizinan yang berbeda.
		• Perda Kota Tarakan No. 5/2011 tentang Izin Usaha Peternakan	• Perizinan masih dilakukan secara manual karena Perda belum terintegrasi dengan Online Single Submission



KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH WILAYAH KALIMANTAN



KEBIJAKAN PENDANAAN: ARAH PERKUATAN PENDANAAN KE DAERAH

» Meningkatkan Akuntabilitas Transfer ke Daerah melalui:

- 1 Mengimplementasikan pendanaan kebutuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) secara bertahap sebagai komponen dalam perhitungan transfer ke daerah.
- 2 Mengimplementasikan secara bertahap prinsip-prinsip *output based transfer* dalam transfer ke daerah (berdasarkan kinerja).



Mendorong lebih luas hibah daerah khususnya untuk isu-isu prioritas tertentu seperti air minum, sanitasi, jalan dan lainnya.



Untuk memperkuat sinergi prioritas pusat dan daerah:

- » **DAK Reguler** akan bersifat **bottom-up** (khususnya pelayanan publik mendasar).
- » **DAK Penugasan** akan lebih bersifat **top-down** (khususnya pada isu tematik nasional/kewilayahan).

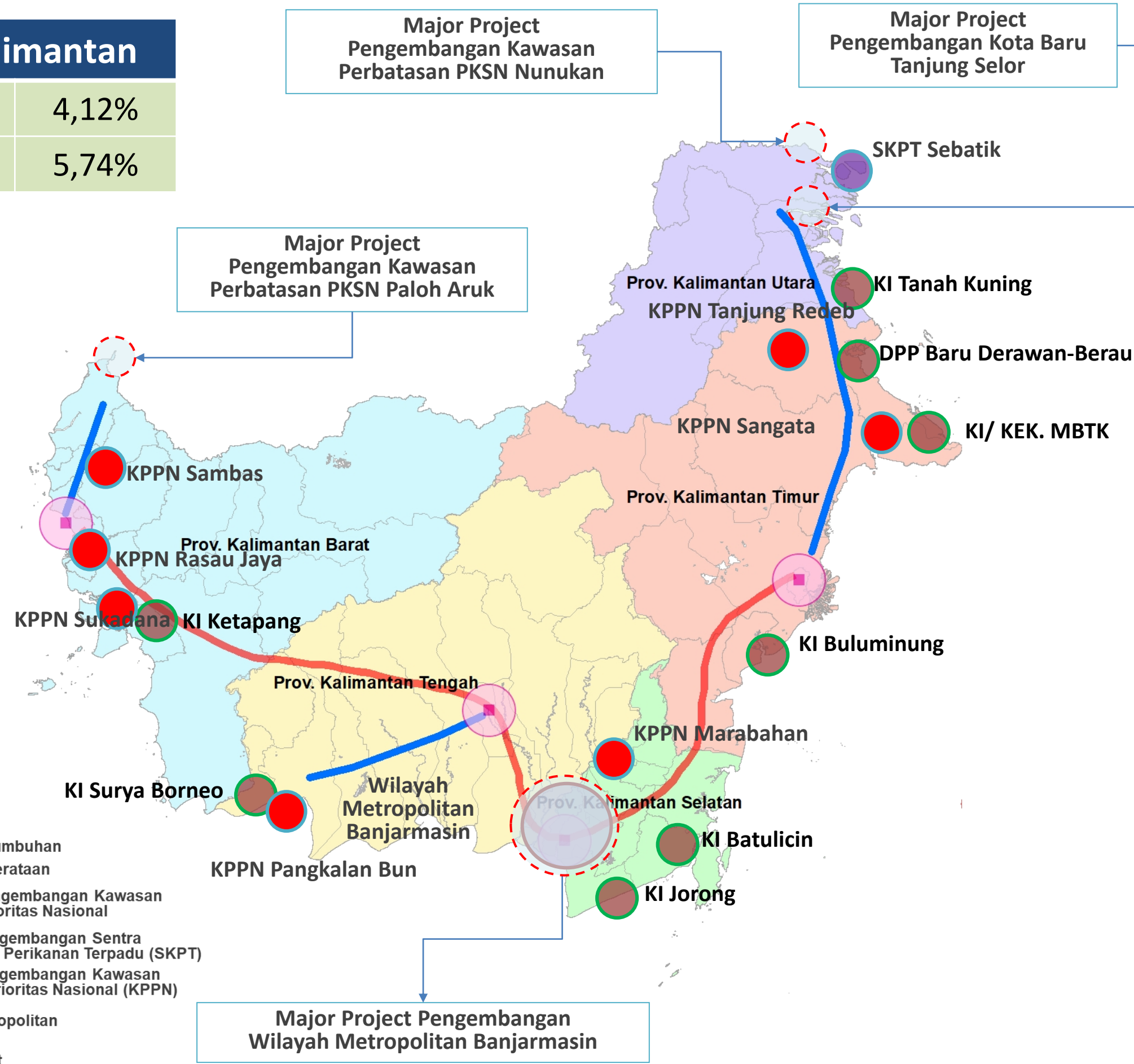


ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN



LPE Kalimantan

2020	4,12%
2024	5,74%



ARAH KEBIJAKAN

Percepatan **pertumbuhan**, **diversifikasi**, dan **pelestarian alam**

STRATEGI

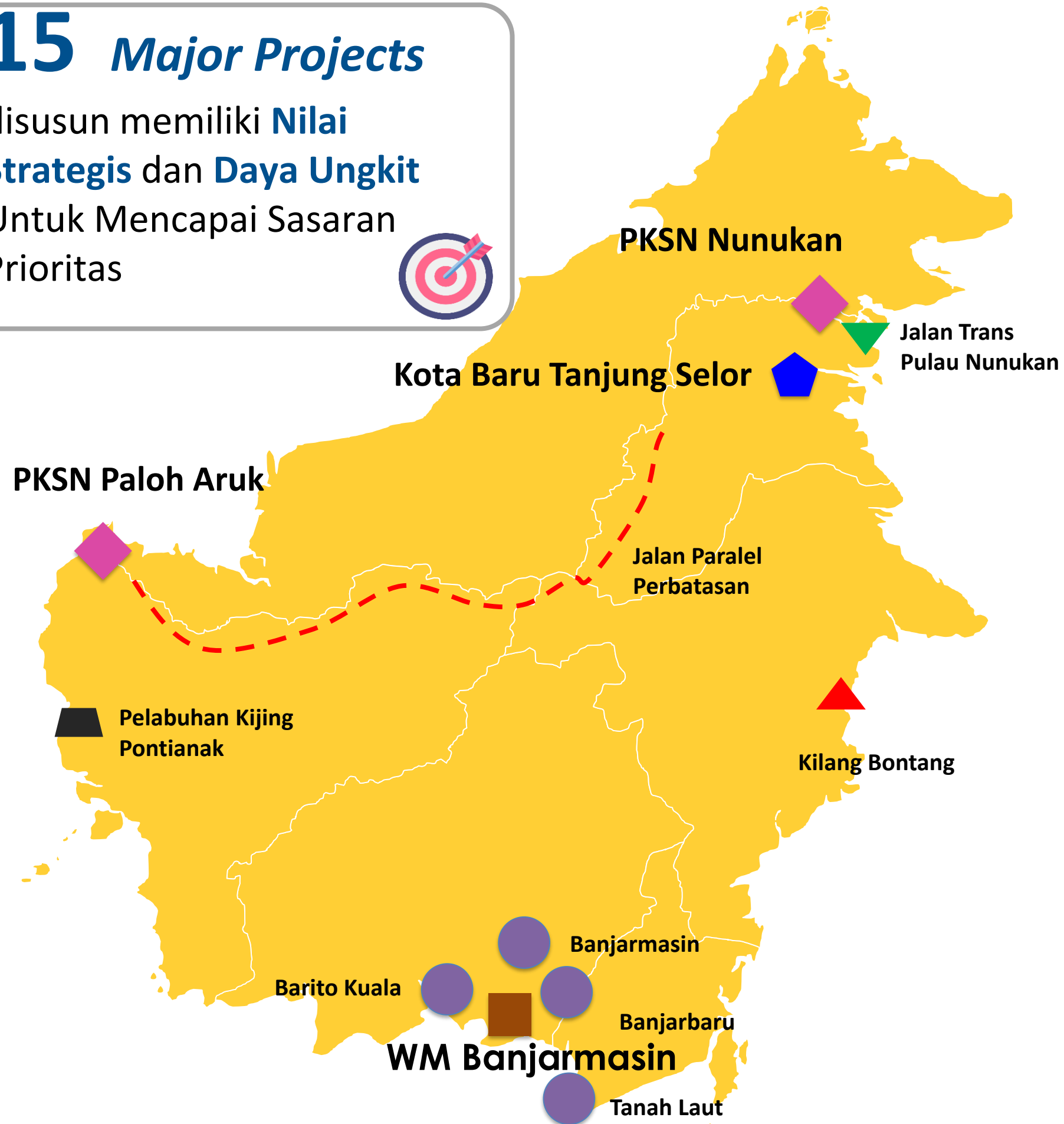
1. Mempertahankan peran sebagai **lumbung energi nasional**;
2. Mengembangkan **industri pengolahan** (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang;
3. Memperkuat peran kawasan perdesaan prioritas nasional agar menjamin basis produksi untuk **hilirisasi industri**;
4. Memperkuat **penguatan kawasan transmigrasi mandiri**;
5. Menjaga **kawasan perbatasan** untuk menjamin kedaulatan NKRI;
6. Menjaga kawasan dengan fungsi **pelestarian lingkungan dan ekologis**;
7. Menjamin pemenuhan **konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar** pada kawasan dan kota-kota baru;
8. Meningkatkan **kapasitas pemerintahan daerah** untuk **mempercepat penerapan SPM**, meningkatkan kerjasama antara daerah dan meningkatkan PAD;
9. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana serta penguatan sistem mitigasi bencana;
10. Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional



MAJOR PROJECTS PULAU KALIMANTAN

15 Major Projects

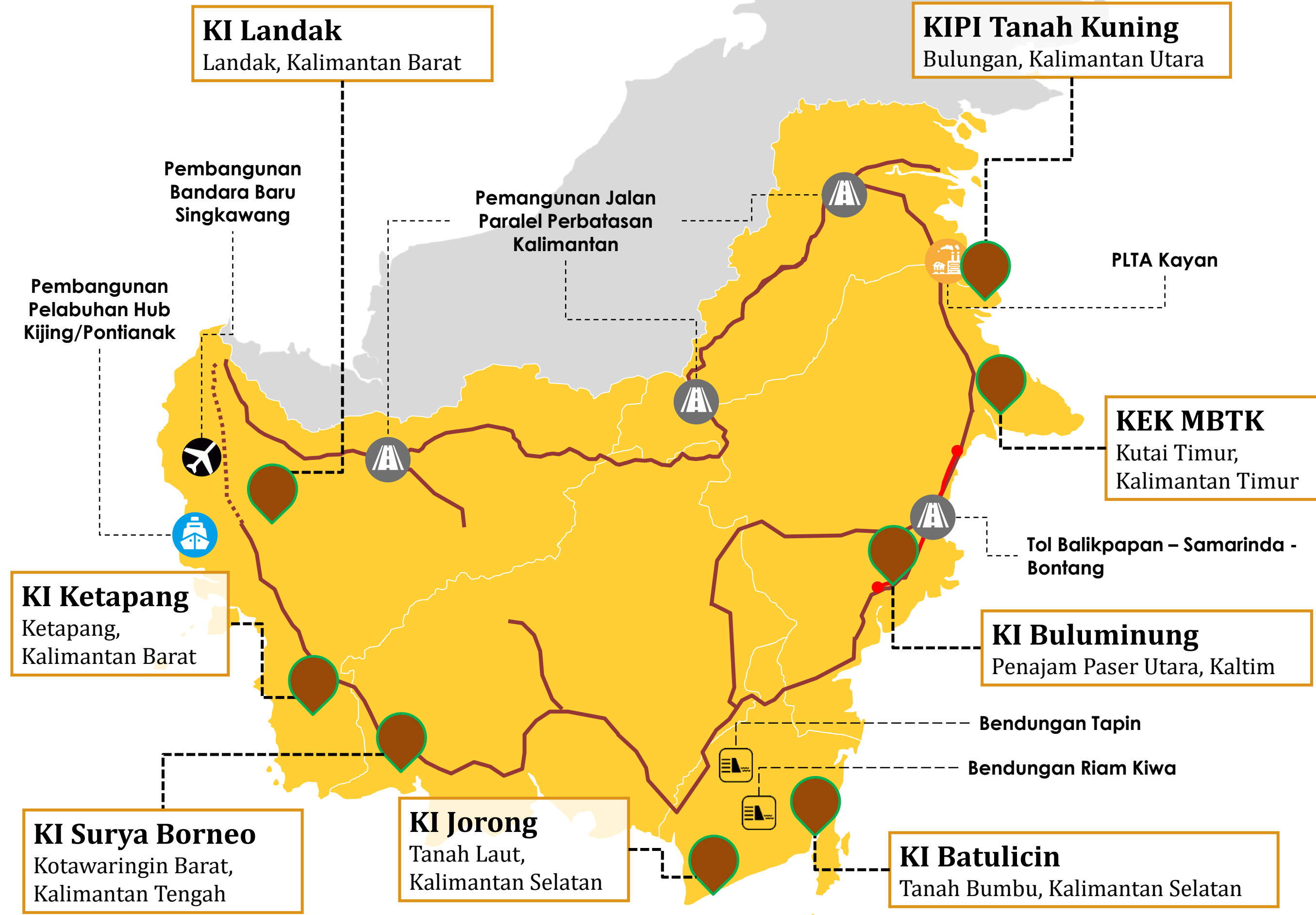
disusun memiliki **Nilai Strategis** dan **Daya Ungkit** Untuk Mencapai Sasaran Prioritas



- Pemindahan Ibu Kota Negara
- Wilayah Metropolitan Banjarmasin
- Kota baru Tanjung Selor
- ◆ PKS N Paloh Aruk dan PKS N Nunukan
- Penyediaan hunian layak dan terjangkau, termasuk hunian vertikal di perkotaan (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut)
- ▤ Standardisasi Kinerja dan Pengembangan Jaringan 7 Pelabuhan Hub Terpadu: Pelabuhan Kijing/Pontianak
- ▲ Pembangunan Kilang Baru di Bontang (Kalimantan Timur)
- ▼ Penanganan Jalan Trans/Lingkar Pulau Terluar dan Tertinggal: Pulau Nunukan
- Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan
- Penyelesaian Program 35.000 MW (Target 2020-2024: Pembangkit 2.110 MW, Jaringan Transmisi 5.904 kms/1.670 MVA)
- Pengembangan Infrastruktur Gas Kota (Target Pembangunan TA 2020/2021 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara)
- Penuntasan Infrastruktur TIK (19.300 Titik Layanan Satelit Multifungsi dan BTS/lastmile di 325 desa di Pulau Kalimantan)
- Pengembangan 5 Waduk Multiguna
- Pembangunan 10 Juta Sambungan Rumah (SR) di Indonesia (Target 1 Juta SR di Pulau Kalimantan)
- Peningkatan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (Target 60.500 SR IPAL Kota dan 9 unit IPLT)



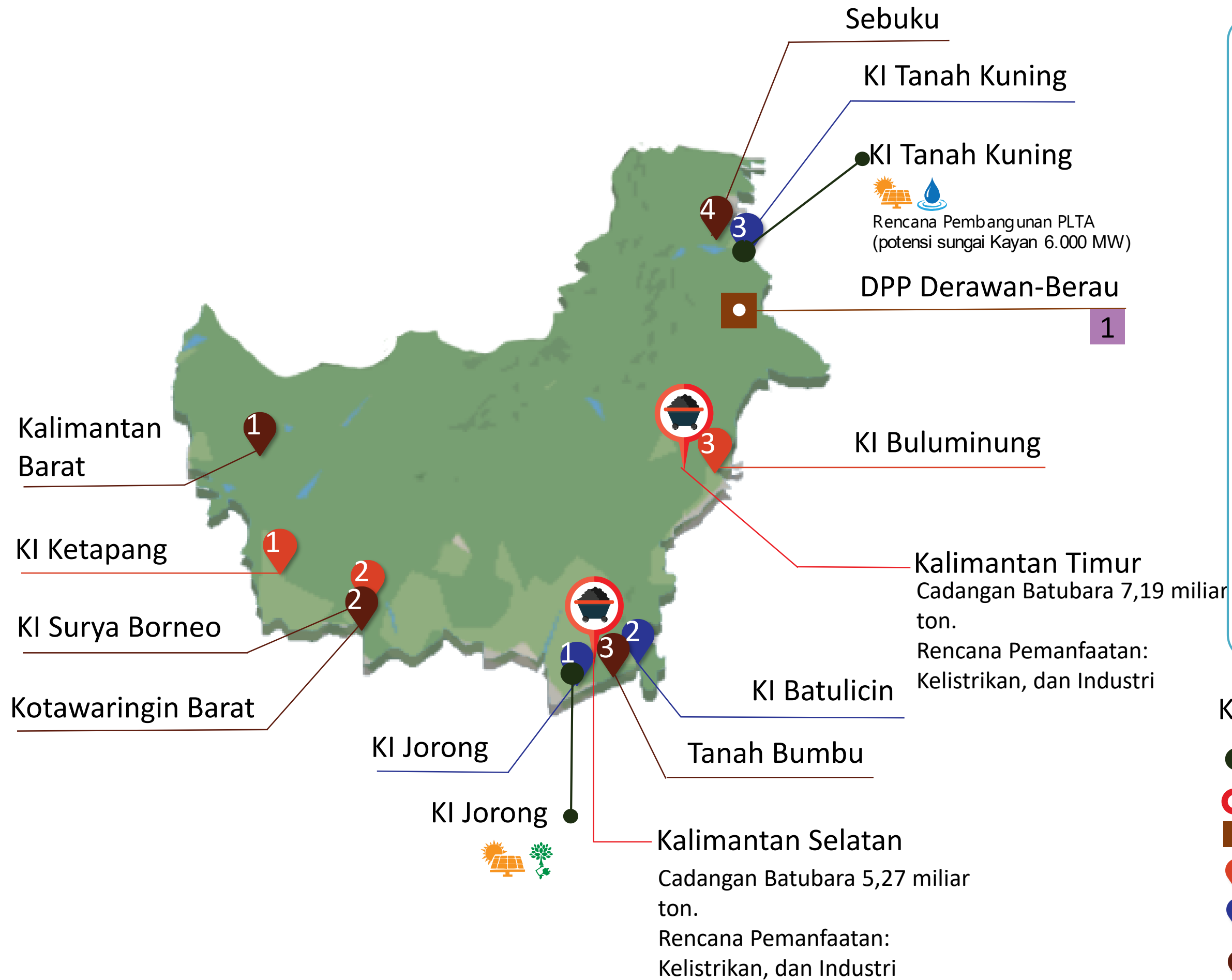
HIGHLIGHT PROGRAM PRIORITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH KALIMANTAN



- ☐ **Pembangunan Jalan Lintas Tengah dan Paralel Perbatasan Kalimantan:**
 - Penyelesaian konektivitas Trans Kalimantan
 - Membuka isolasi dan mendorong pertumbuhan kawasan perbatasan
- ☐ **Pembangunan Pelabuhan Hub Kijing/Pontianak**
 - Bagian dari 7 pelabuhan hub *Integrated Port Network*
- ☐ **Bandara Baru Singkawang**
 - Mendukung pariwisata, bagian dari 25 bandara baru 2020-2024
- ☐ **Tol Balikpapan - Samarinda - Bontang**
 - Mendukung kawasan industri dan konektivitas antar kota
- ☐ **KA Regional Kalimantan**
 - Mendukung Ibu Kota Negara
 - Mendukung angkutan barang
- ☐ **Pengembangan PLTA Kayan**
 - Mendukung KIPI Tanah Kuning
- ☐ **Bendungan Tapin dan Riam Kiwa**
 - Pengendali banjir, penyediaan air baku dan pembangkit listrik



HIGHLIGHT RENCANA PEMBANGUNAN EBT, INDUSTRI DAN PARIWISATA



Tantangan

- Kepastian status lahan dan tata ruang (RTRW dan RDTR)
- Ketersediaan dan kualitas infrastruktur konektivitas dan dasar
- Penyediaan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur dan pariwisata
- Penerapan OSS
- Pengelolaan kawasan
- Integrasi hilirisasi industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
- Pengelolaan sampah dan limbah
- Pengurangan retribusi untuk logistik dan distribusi bahan baku industri
- Pengorganisasian UMKM sebagai pemasok

Keterangan :

- Prioritas pembangunan EBT untuk KI
- Destinasi Pariwisata Prioritas
- Destinasi Pariwisata Prioritas Baru
- Kawasan Industri Prioritas Nasional
- Kawasan Industri baru yang dikembangkan
- Kawasan *smelter*
- Cadangan batubara

KSPN/KPPN

- 1 KPPN Derawan-Sangkalaki dskt, KPPN Tanjung Redeb dskt.

Energi Surya

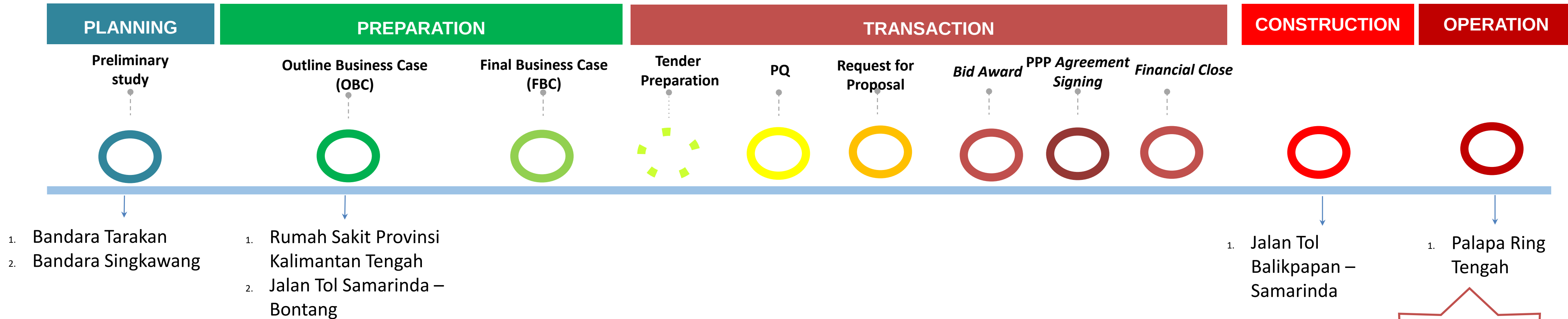
Energi Biomassa

Energi Air

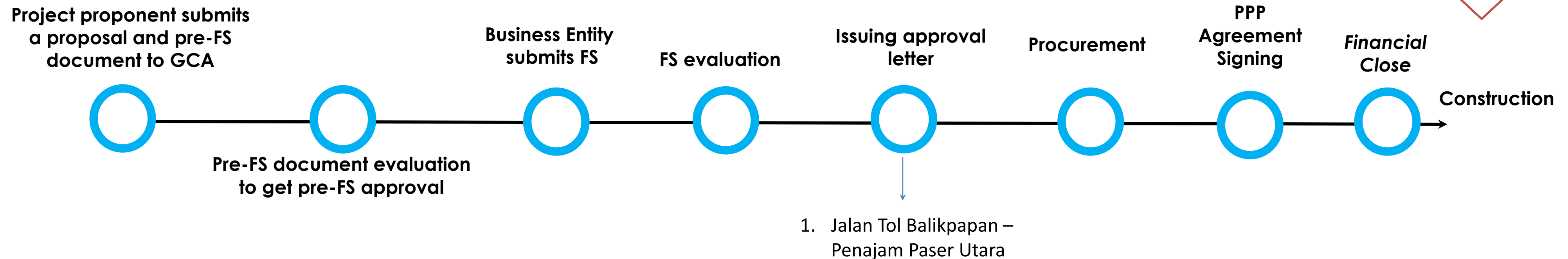


TAHAPAN PROYEK KPBU WILAYAH KALIMANTAN

SOLICITED



UNSOLICITED



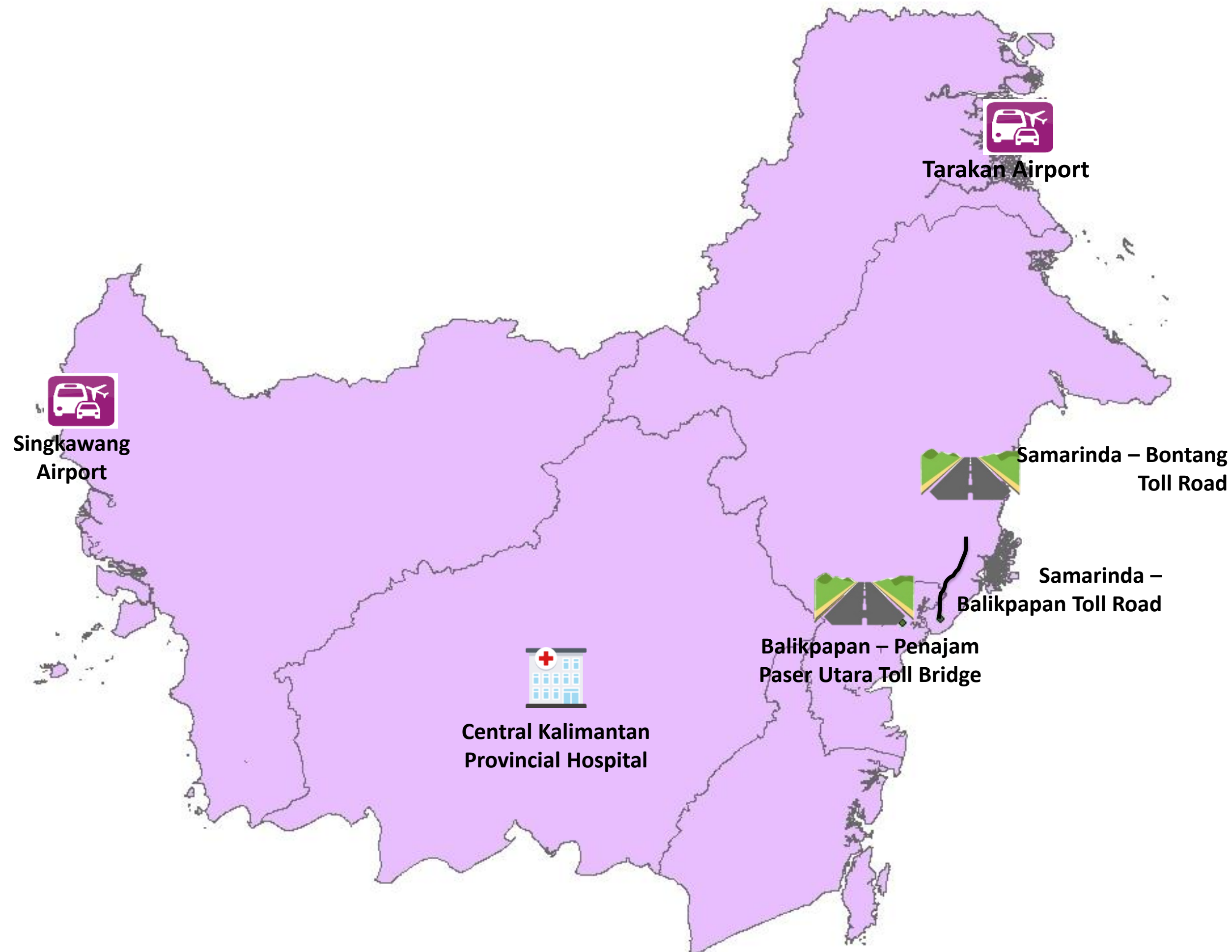


DAFTAR PIPELINE PROYEK KPBU DI WILAYAH KALIMANTAN

LOKASI	PROYEK	NILAI PROYEK (Rp)	PJPK	PROGRES
KALIMANTAN TENGAH	Rumah Sakit Povinsi Kalimantan Tengah	1,13 T	Pemda Provinsi Kalimantan Tengah	- DPRD Kalteng mendukung proyek serta penganggaran AP, akan dibuat Perda
KALIMANTAN BARAT	Bandara Singkawang	1,31 T	Kementerian Perhubungan	- OBC sedang dipersiapkan oleh Pemda, dibantu oleh Kemenhub - Akan dilakukan market sounding minggu ke-2 September
KALIMANTAN TIMUR	Jalan Tol Balikpapan-Samarinda	11,51 T	BPJT	- Dalam tahap konstruksi
	Jalan Tol Balikpapan – Penajam Paser Utara	16,49 T	BPJT	- Proses lelang dilakukan pada bulan Juli
	Jalan Tol Samarinda – Bontang	9,4 T	BPJT	- Proses pengajuan PDF ke Kemenkeu
KALIMANTAN UTARA	Bandara Tarakan	1,17 T	Kementerian Perhubungan	- BLU mungkin untuk di KPBU kan seperti satelit multifungsi yang dikerjakan oleh Bakti dengan Kominfo sebagai PJPK - Ada wacana bundling dengan Bandara Kayong Kalimantan barat - Bandara Juwata ini adalah asset Kemenhub dan yang di KPBU kan adalah sebagian dari fasilitasnya
LOKASI	PROYEK	NILAI PROYEK (Rp)	PJPK	PROGRES
Regional Kalimantan	Palapa Ring Tengah	5,8 T	Kominfo	- Sudah beroperasi



PETA PROYEK KPBU DI WILAYAH KALIMANTAN





TOPIK KHUSUS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

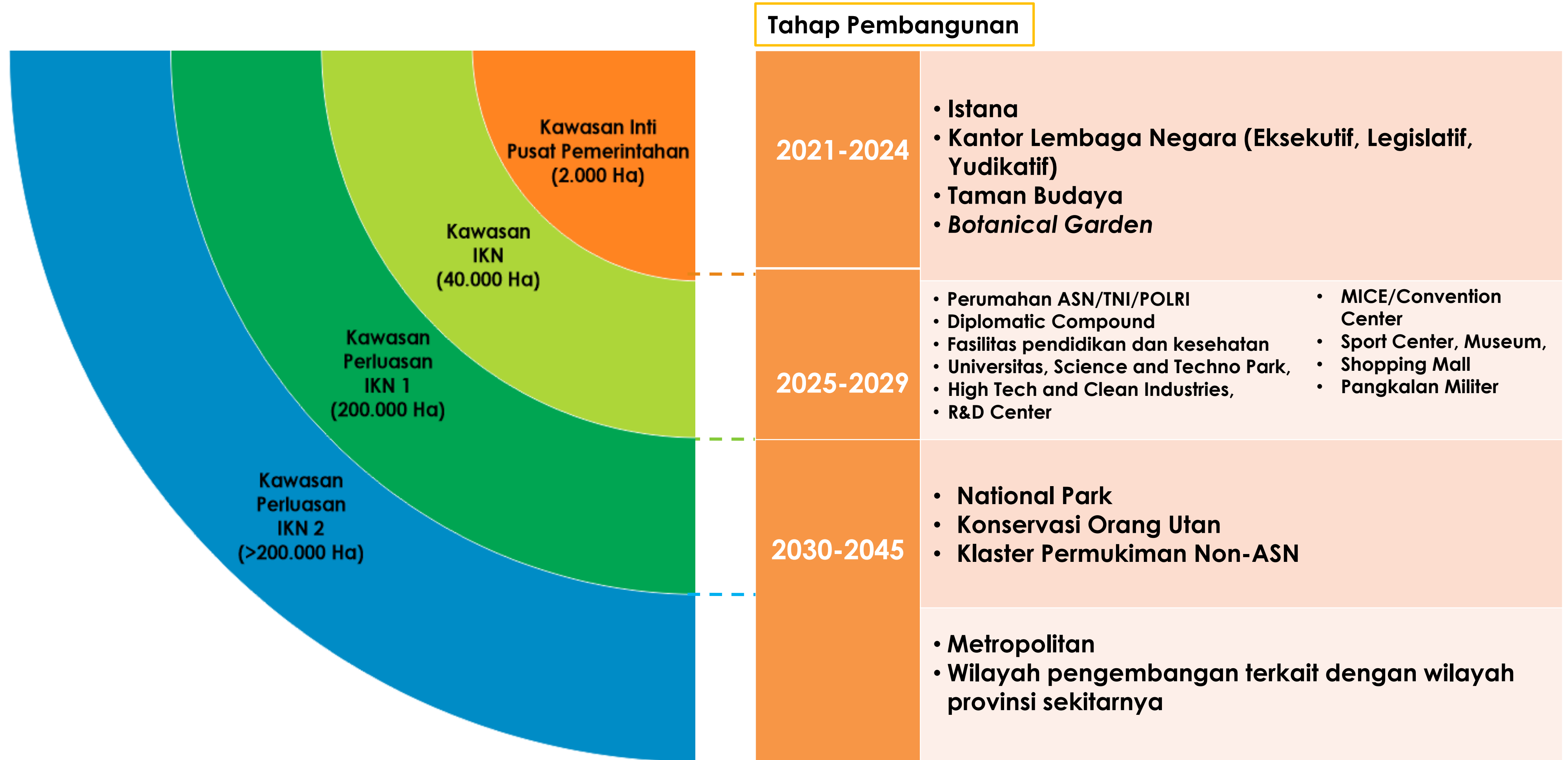


VISI IBU KOTA NEGARA BARU





RANCANGAN ZONASI DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN





DAMPAK EKONOMI PEMINDAHAN IBU KOTA KE KALIMANTAN

01 Estimasi peningkatan Real GDP Nasional sebesar **0,1% - 0,2%**;

02 Penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan:
Kenaikan Price of capital: 0,23% *Kenaikan Price of Labour: 1,37%*

03 Investasi pembangunan ibu kota baru akan memberikan efek pengganda terhadap perekonomian nasional sekitar:
*Output Multiplier : 2,3** *Employment Multiplier: 2,9**

04 Pemindahan ibukota ke Kalimantan akan mendorong penurunan kesenjangan antar wilayah, karena:

- **Mendorong perdagangan antar wilayah**, terutama perdagangan antara pulau Jawa dengan wilayah di luar pulau Jawa serta antar wilayah di luar pulau Jawa
- **Mendorong investasi** terutama di provinsi ibukota negara baru dan provinsi sekitarnya.
- **Mendorong diversifikasi ekonomi**, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional di provinsi tersebut.

05 Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan akan **meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional**, terutama Sektor Jasa

**: type II Multiplier*

Sumber : Hasil Analisis dengan menggunakan Model Computable General Equilibrium (CGE) IndoTERM



TERIMA KASIH



LAMPIRAN



ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN LAINNYA



KARAKTER BANGSA



Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa

- Menguatnya radikalisme, terorisme, dan ideologi transnasional lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila



Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti

- Baru 30% daerah memiliki Indeks Integritas UN yang tinggi. (Kemdikbud, 2017)
- Dari 3,3 juta pengguna narkoba, 810.267 pelajar (24%) (BNN, 2017)



Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama

- Berkembangnya paham dan praktik beragama yang tidak sejalan dengan pesan-pesan profetik kitab suci untuk menciptakan perdamaian dan kemaslahatan
- Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami penurunan dari 75,36 pada tahun 2015 menjadi 70,90 pada 2018.



Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa

- Masih tingginya angka perkawinan anak 11,2 persen (Susenas 2018).
- Meningkatnya angka perceraian, sebesar rata-rata 3 persen pertahun (Pengadilan Agama, 2017);



Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia

- Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan



Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

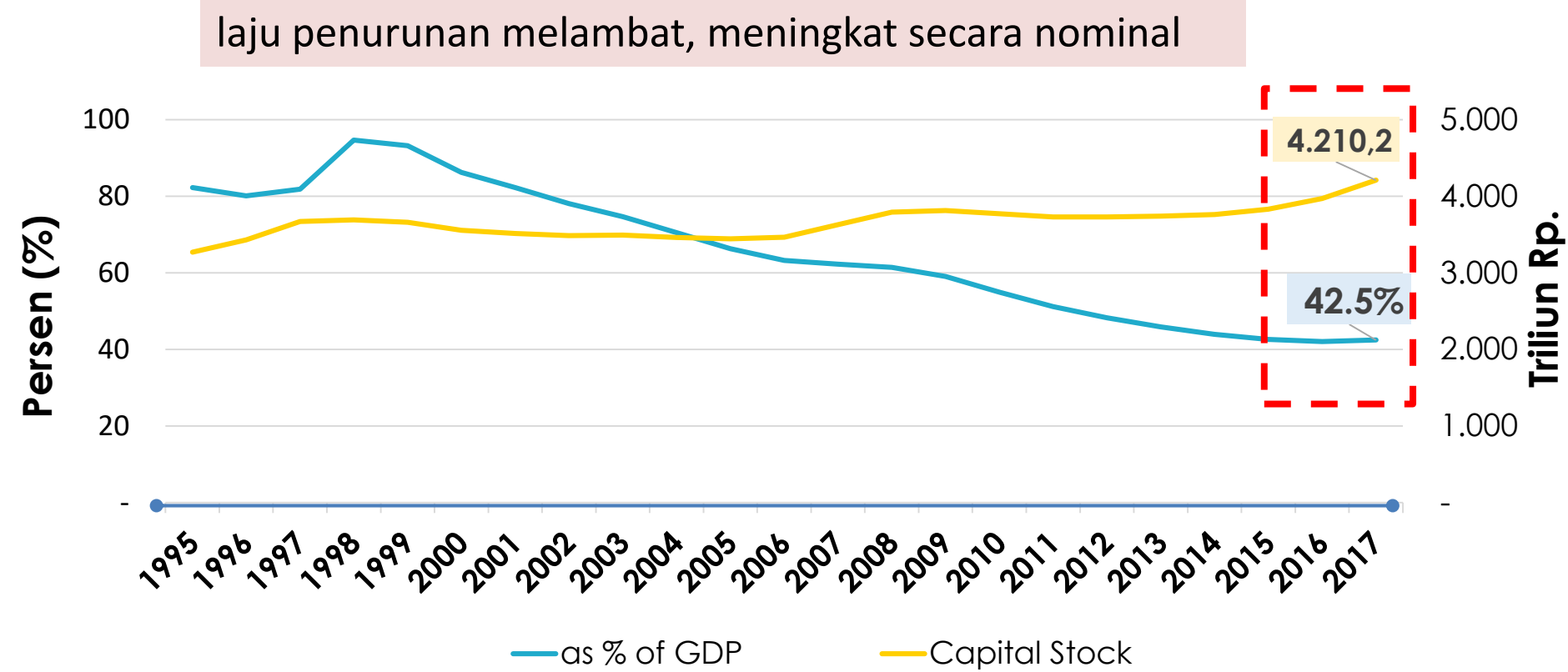
- Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0
- Masyarakat yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik baru mencapai 45,72 % (Susenas MSBP 2018)



INFRASTRUKTUR

Infrastruktur Masih Terbatas

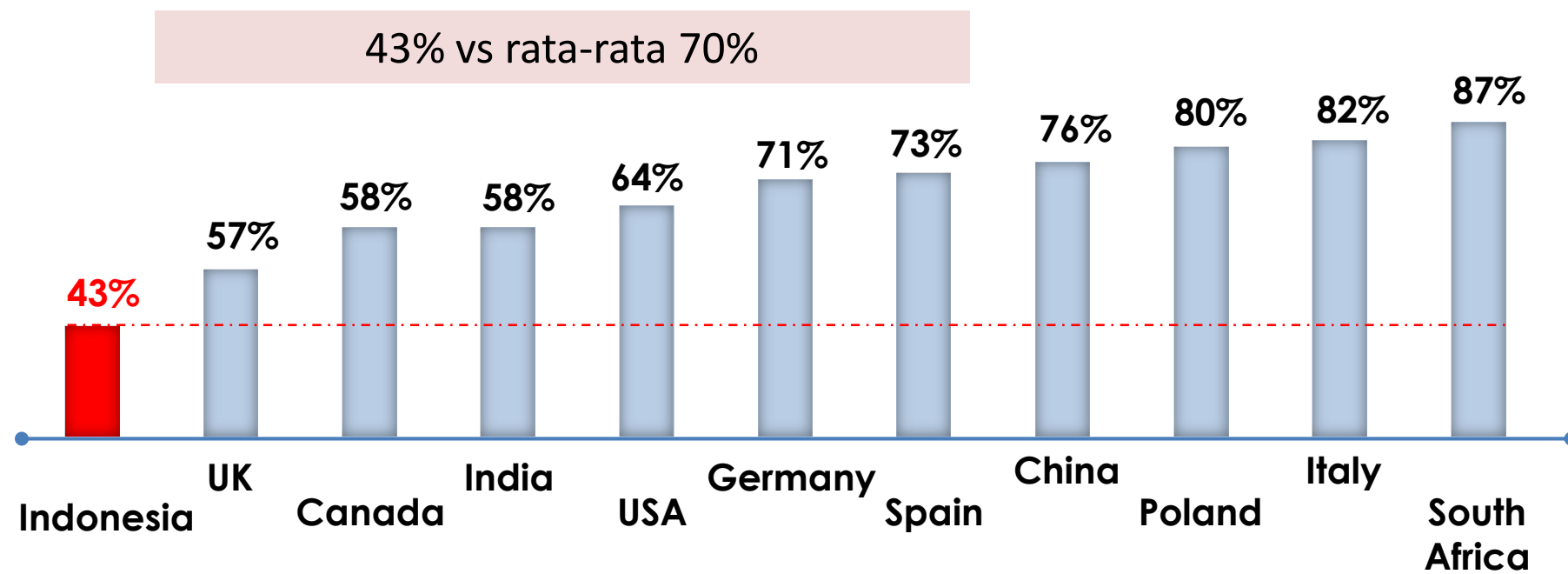
PENURUNAN STOK INFRASTRUKTUR TERHADAP PDB



Berdasarkan Persentase PDB (LHS) dan Rp triliun (RHS)

Sumber: Prospera

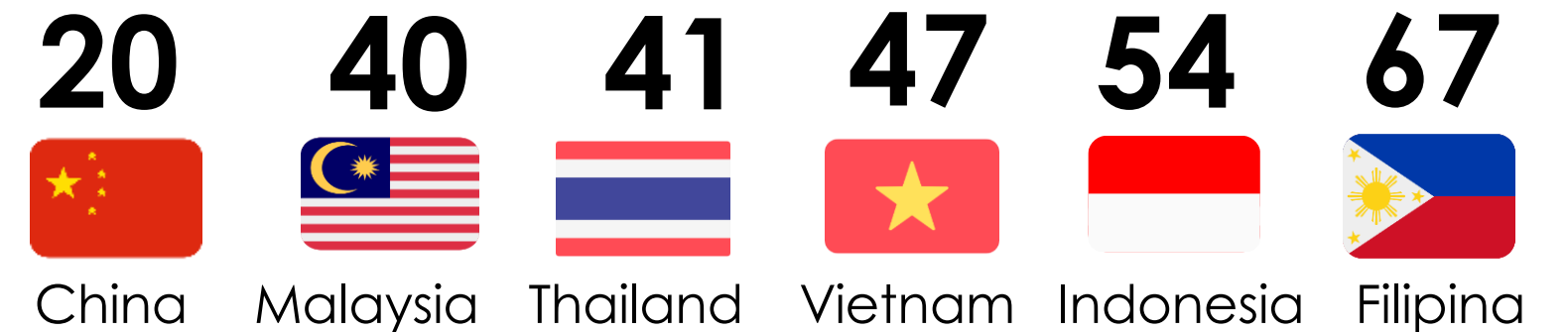
STOK INFRASTRUKTUR DI BAWAH RATA-RATA INTERNASIONAL



Sumber: World Bank (2015), Mckinsey Global Institute Report (2013)

KINERJA INFRASTRUKTUR LOGISTIK MASIH RENDAH

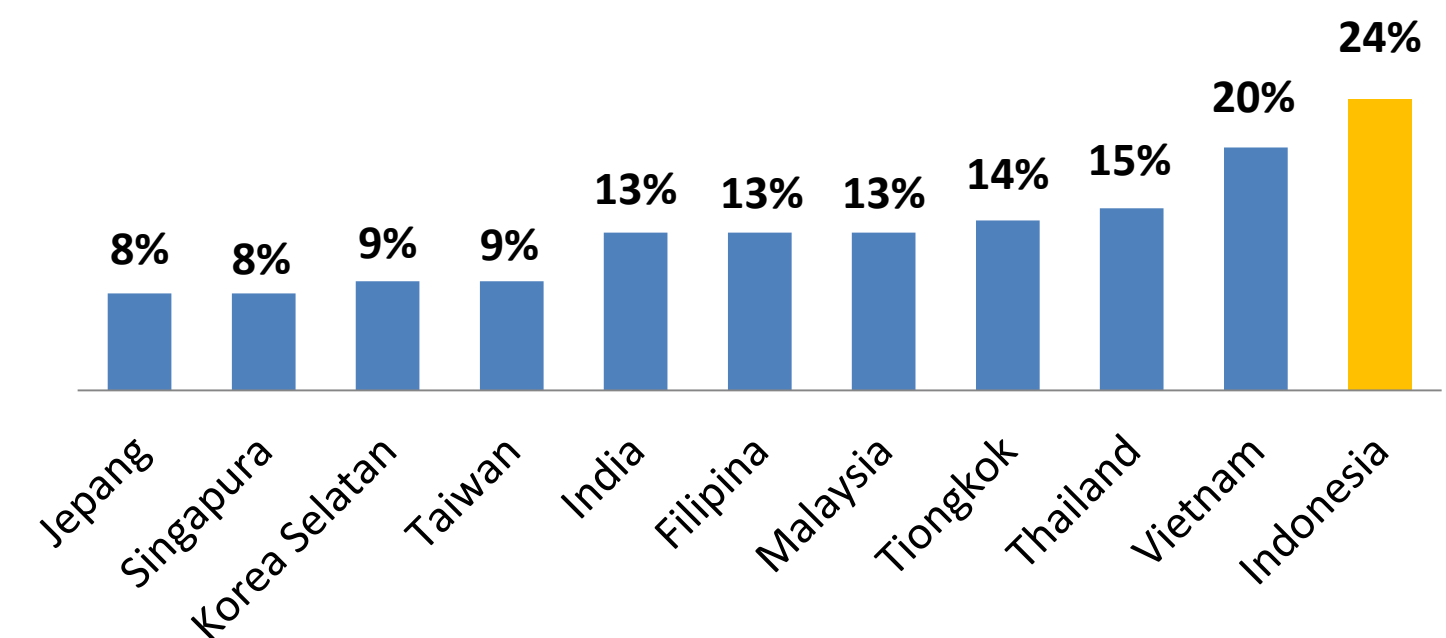
Peringkat kinerja infrastruktur logistik



Sumber: Logistic Performance Index, World Bank (2018)

BIAYA LOGISTIK MASIH TINGGI

Biaya logistik (persentase terhadap PDB)



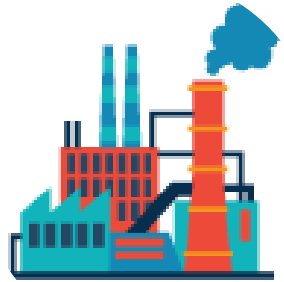


KEWILAYAHAN



KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH

- Konsentrasi kegiatan ekonomi masih terpusat di KBI terutama Pulau Jawa



PENGUATAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

- Tingkat keberhasilan pusat pertumbuhan baru yang rendah akibat konektivitas yang belum optimal



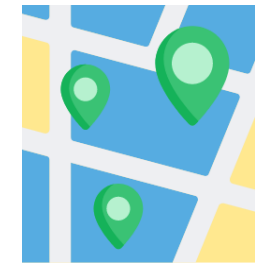
PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

- Akses dan kualitas pelayanan dasar yang masih terbatas
- Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi
- Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi



PENGELOLAAN URBANISASI

- Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 1,4% PDB. Bandingkan dengan Cina dan Negara Asia Timur dan Pasifik lain yang rerata mencapai 2,7% PDB)



PEMANFAATAN RUANG

- Pemanfaatan ruang belum sesuai dengan peruntukannya menyebabkan terjadinya korban bencana alam dan hambatan pembangunan infrastruktur.



KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DAN KETIMPANGAN PEMILIKAN, PENGUASAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

- Cakupan bidang tanah bersertifikat yang masih rendah dan ketimpangan kepemilikan lahan antara rumah tangga tani dan pemilik lahan.



FUNGSI IBUKOTA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN

- Dominasi wilayah metropolitan Jakarta dalam perekonomian nasional dan tingginya *gap* dengan daerah lain di Indonesia (kontribusi wilayah metropolitan Jakarta 20,85% nasional, Jawa 58,49 % dari PDB Nasional (BPS, 2018),

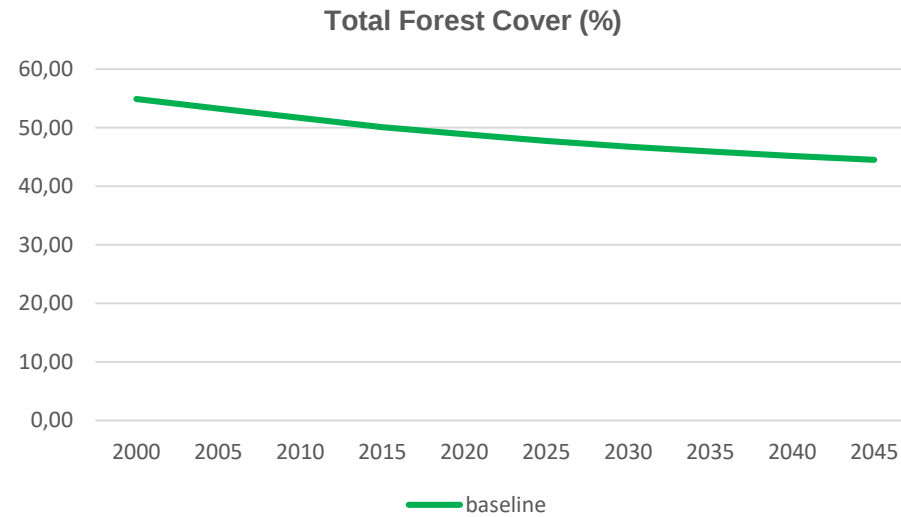


LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA



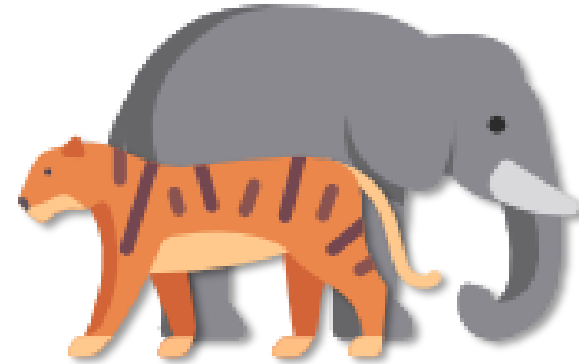
Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun. Biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan menjadi tinggi



Kerusakan Tutupan Hutan

Jumlah tutupan hutan terus berkurang hingga di bawah 50 persen dari total luas wilayah Indonesia



Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Kerusakan habitat, perburuan liar, dan masuknya jenis asing invasif meningkatkan risiko kepunahan



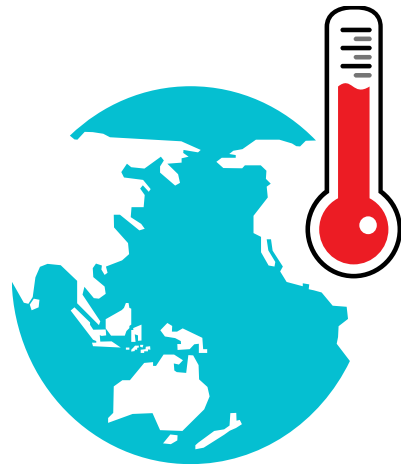
Kelangkaan Air

Khususnya di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara semakin meluas. Proporsi wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6% di 2045



Kelangkaan Energi

Masih sangat bergantung pada sumber energi fosil yang tinggi emisi dan suatu saat akan habis



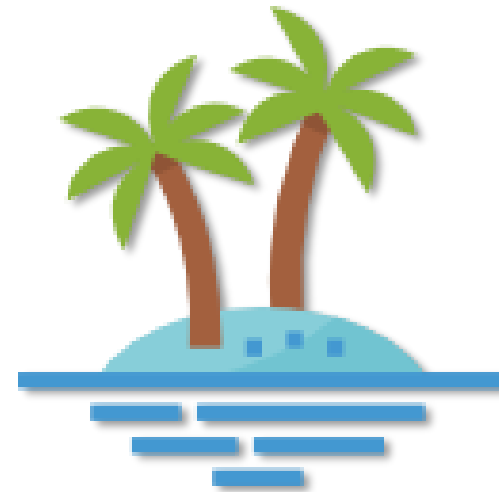
Kenaikan Suhu Global

Laporan PBB: 2018 merupakan tahun keempat terpanas sepanjang sejarah bumi



Cuaca Ekstrem

Kondisi cuaca ekstrem terus terjadi, meningkatkan potensi bencana dan bahaya terhadap transportasi



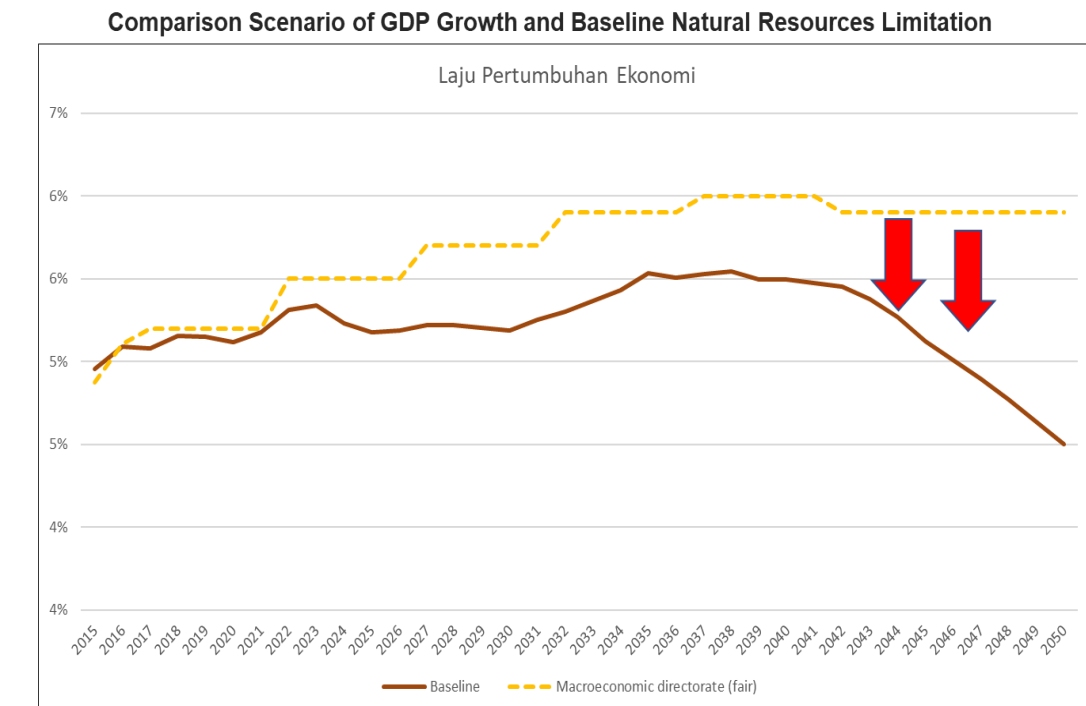
Pesisir Rentan

terhadap dampak perubahan iklim meningkat hingga 18.480 KM di tahun 2045. Luas coral reef berkurang 90% di tahun 2045 bila suhu naik 1.5 C (IPCC, 2018)



Ancaman Bencana

Tingkat risiko bencana di Indonesia sangat tinggi. Mayoritas pemukiman dan infrastruktur dibangun di area rawan bencana



Kerugian Ekonomi

akibat kerusakan lingkungan hidup serta dampak bencana diproyeksi menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional

Belum Kokoh Kelembagaan Demokrasi

1

- Biaya politik tinggi; dan
- Partisipasi politik belum optimal.



Belum Optimalnya Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri

2

- Melemahnya multilateralisme dan menguatnya unilateralisme
- Terbatasnya pelibatan peran *non-state actors* dalam KPI.



Belum Optimalnya Penegakan Hukum

3

- *Overcrowding* Lapas dan Rutan sebesar 208%
- Rendahnya peringkat aspek penegakan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan mendapatkan kredit. (EoDB Index, 2019)



Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Birokrasi dan Pelayanan Publik

4

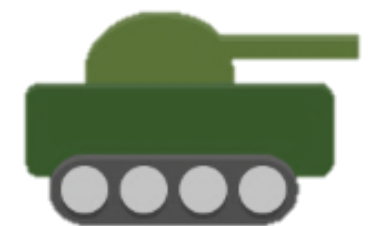
- Rendahnya *skill* ASN;
- Kelembagaan belum efektif dan akuntabel;
- Kualitas pelayanan publik belum merata.



Ancaman Perang Nonkonvensional Terhadap Kedaulatan Negara

5

- Maraknya serangan siber berbasis *malware*
- Perlombaan teknologi persenjataan-*hybrid warfare*;
- Kejahatan transnasional;
- Sengketa perbatasan.





ISU STRATEGIS LAINNYA WILAYAH PULAU KALIMANTAN



Peran Wilayah sebagai **paru-paru dunia** terancam dengan tingginya ancaman kerusakan hutan



Relatif masih tingginya potensi bencana, khususnya bencana kebakaran hutan dan banjir, yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya **kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi yang komprehensif**



Penguatan peran **daerah perbatasan sebagai pintu beranda negara** belum optimal



Menurunnya penerimaan daerah



Infrastruktur dan layanan dasar untuk kesehatan dan produktivitas yang masih terbatas serta **penerapan SPM** yang masih perlu ditingkatkan



Tata kelola dan **kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan serta kerjasama antar daerah** yang belum optimal



Konektivitas intra-wilayah belum memadai



Pengembangan **industri berbasis sumberdaya alam** belum optimal

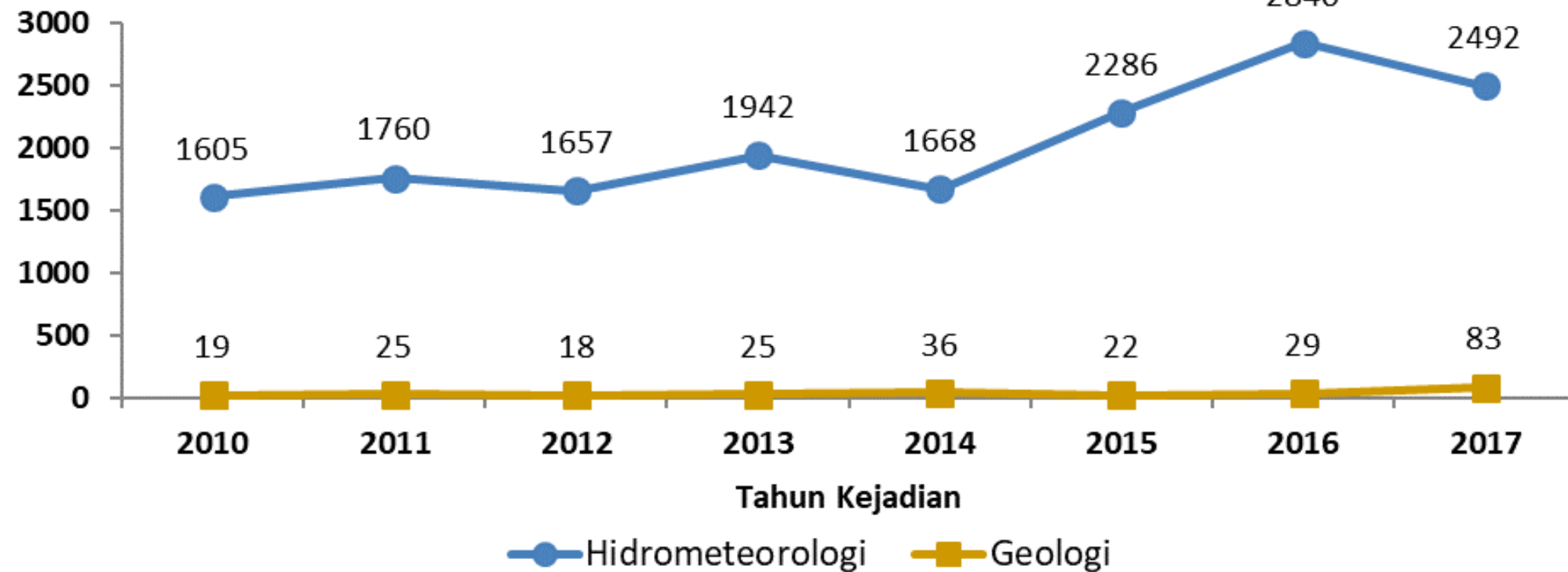


Ketahanan fisik dan sosial kota masih rentan atas perubahan iklim, bencana dan polusi, serta akibat kesenjangan dan kemiskinan perkotaan

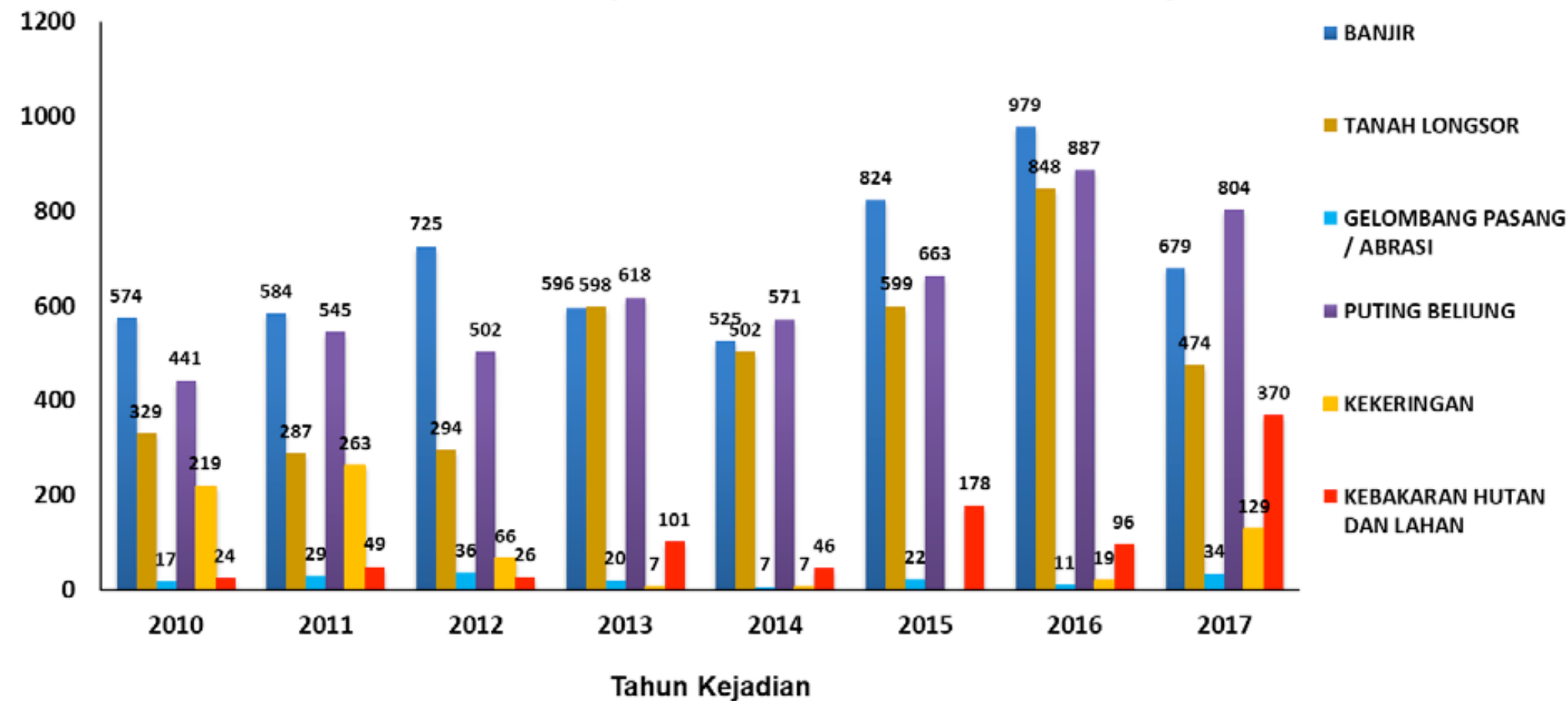


KONDISI RISIKO BENCANA DI INDONESIA

Jumlah Kejadian Bencana



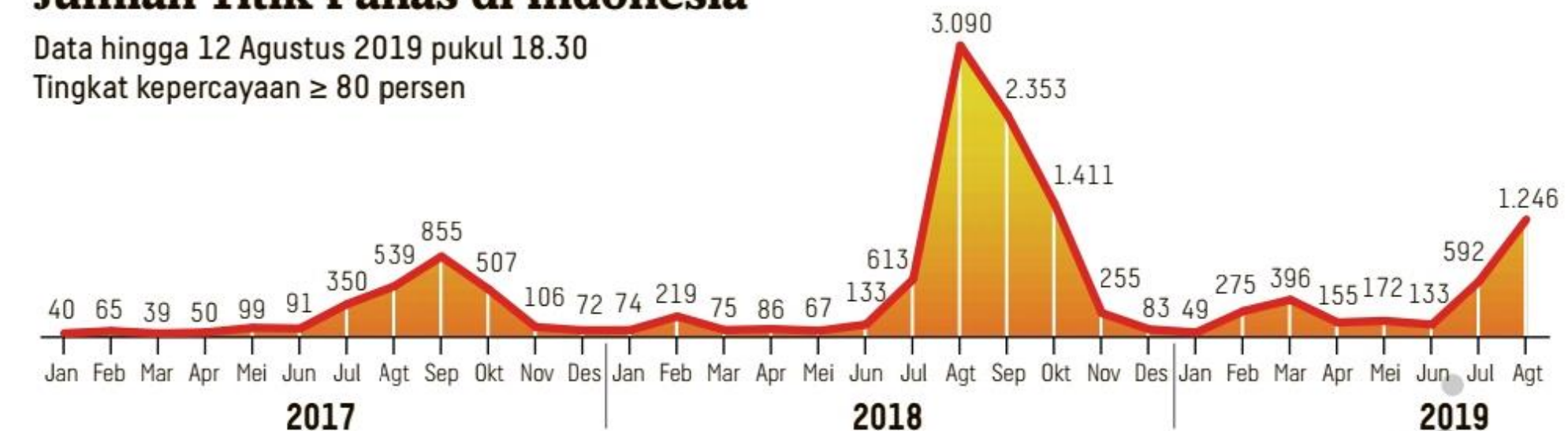
Jumlah Kejadian Bencana Hidrometeorologi



- Berdasarkan *World Risk Report* (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat **risiko bencana yang tinggi** disebabkan tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana.
- Hampir **75 persen** infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan/bahaya.
- Selama kurun waktu 8 tahun (2010-2017) terjadi peningkatan 887 kejadian bencana hidrometeorologi; sementara dalam kurun waktu yang sama, bencana geologi meningkat 64 kejadian.

Jumlah Titik Panas di Indonesia

Data hingga 12 Agustus 2019 pukul 18.30
Tingkat kepercayaan ≥ 80 persen



Sumber: BNPB, 2018

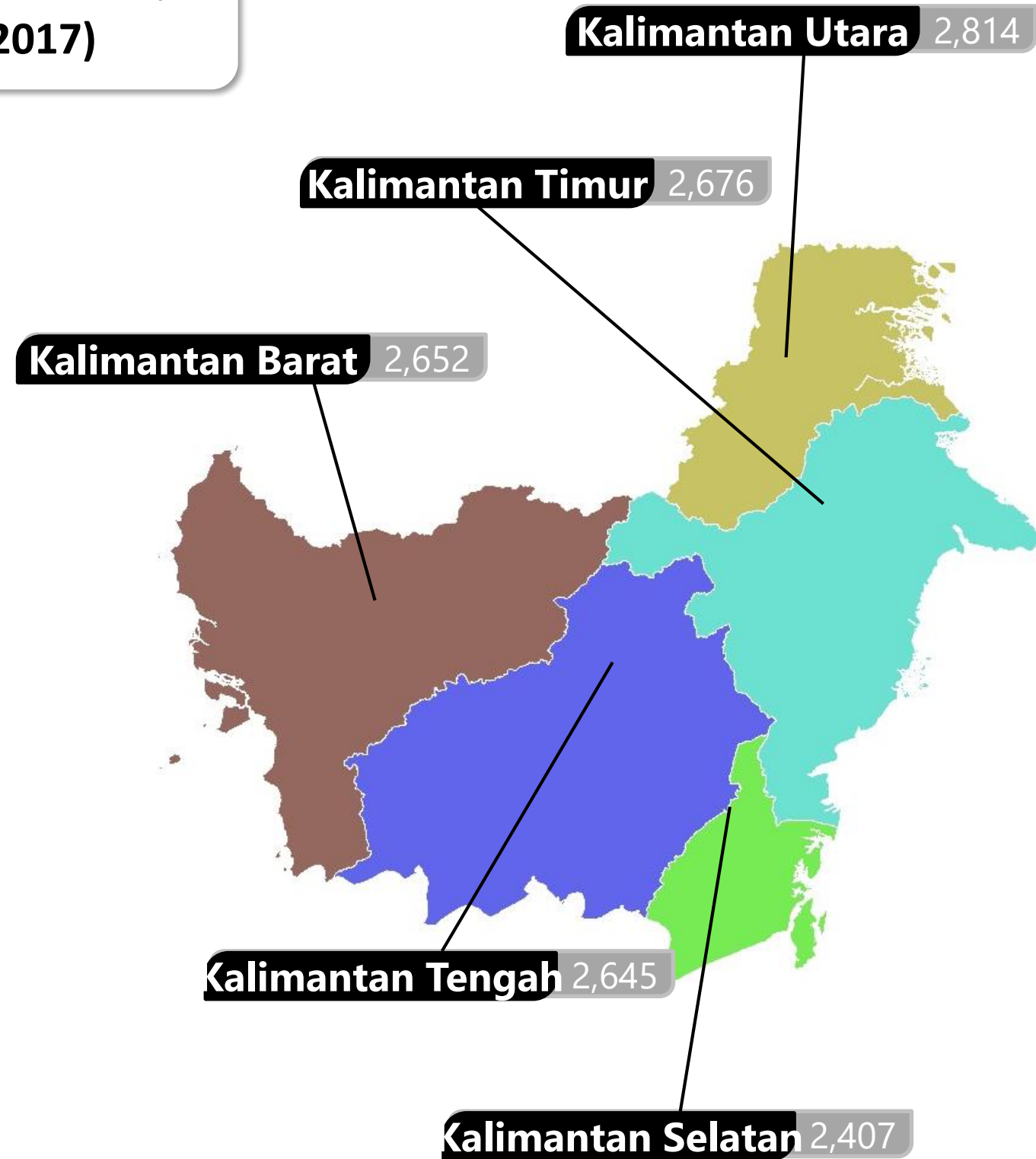
Sumber: sipongi.menlhk.go.id, diolah oleh Litbang Kompas 2019

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA WILAYAH KALIMANTAN



PENANGANAN ISU KEPENDUDUKAN YANG TEPAT MENJADI KUNCI PENINGKATAN SDM

TFR Nasional: 2,4
(SDKI, 2017)



Semua provinsi di Kalimantan memiliki TFR di atas rata-rata nasional ($TFR > 2,4$), sehingga diperlukan strategi khusus yaitu:

- Pengembangan inovasi dalam Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) program kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan budaya, karakteristik, atau kondisi masyarakat lokal.
- Advokasi intensif kepada pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan.
- Peningkatan akses dan layanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas terutama bagi keluarga miskin

Pertumbuhan penduduk yang seimbang ditujukan untuk:

- **Optimalisasi bonus demografi** dengan meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan keahlian dan kesehatan serta upaya penurunan kematian bayi yang lebih cepat.



SHOW CASE KEBUTUHAN REGULASI PADA PENGEMBANGAN KEK MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN (MBTK)



VISI

“Pembangunan KEK MBTK ditunjukan untuk mengembangkan hilirisasi industri kelapa sawit dan optimalisasi transportasi laut sehingga tidak lagi bergantung pada *non-renewable energy*”

Potensi KEK MBTK

- 1 Lokasi KEK MBTK sangat strategis, terletak di Alur Laut Kepulauan Indonesia II
- 2 Jalur Lintas Laut yang menghubungkan Kalimantan - Sulawesi, Tarakan - Toli Toli, Balikpapan - Mamuju
- 3 Melimpahnya produksi 2.8 juta ton CPO (2017) sebagai bahan baku hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit

Peran Regulasi Terkait

- ✓ UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEK
- ✓ PP No. 85 Tahun 2014 tentang KEK MBTK
- ✓ Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Pengembangan Transportasi Laut
- ✓ Perda No. 01 Tahun 2016 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Prov. Kaltim 2016 - 2036

Rekomendasi

- 1 Diperlukan Perda yang mengatur tata ruang dalam kawasan industrialisasi kelapa sawit dalam KEK MBTK
- 2 Diperlukan turunan dari Perda No. 13 Tahun 2012 yang secara khusus mengatur transportasi laut



SHOW CASE KEBUTUHAN REGULASI KAWASAN INDUSTRI LANDAK



Dukungan Kerangka Regulasi Kawasan Industri Landak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional

Perda Provinsi Kalbar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalbar Tahun
2017-2037

INDUSTRI UNGGULAN KAWASAN INDUSTRI LANDAK

- Pembangunan Industri pengolahan kelapa sawit;
- Pembangunan industri pengolahan karet;
- Pembangunan industri pengolahan kayu; dan
- Pembangunan industri industri pengolahan ubi kayu.

IDENTIFIKASI MASALAH KAWASAN INDUSTRI LANDAK

- Pengurusan HPL untuk kawasan industri belum diterbitkan;
- Infrastruktur masih minim, khususnya jalan menuju Pelabuhan Dwikora dan Pelabuhan Samudera Kijing;
- Belum terdapat instalasi pengolahan air bersih; dan
- Belum terdapat instalasi listrik.

REKOMENDASI

- Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, air bersih, dan instalasi listrik; dan
- Pemerintah Daerah perlu menyusun Perda yang mengatur penyesuaian ketersediaan lahan pada KI Landak untuk memberikan kepastian hukum bagi investor.





KELEMBAGAAN KEK MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN (MBTK)

Identifikasi Kelembagaan KEK

KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) difokuskan pada Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Kayu, dan Logistik dibentuk berdasarkan PP No. 85/2014 tentang KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan;

- Keputusan Presiden No. 5/2015 tentang Pembentukan Dewan KEK;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No 5/2014 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan;

Adminstrator KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dibentuk melalui:

- SK Gubernur Kalimantan Timur No. 552.2/1341/EK/2015;
- Keputusan Bupati Kutai Timur No. 510.4/419/2015;
- SK Bupati Kutai Timur No. 500/K.554/2015 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK.



Rekomendasi

1. Diperlukan pembagian kewenangan antara Administrator KEK dengan DPMPTSP daerah;
2. Diperlukan penguatan organisasi dan tata laksana Administrator KEK yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.



***HIGHLIGHTS* PEMETAAN VISI-MISI PRESIDEN DALAM RPJMN 2020-2024**



VISI 1 PRESIDEN:

“..Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Menghubungkan Kawasan Industri Kecil, Ekonomi, Pariwisata, Persawahan, Perkebunan, Tambak Perikanan..”

PEMBANGUNAN TOL LAUT, JEMBATAN UDARA, DAN JALAN TRANS PAPUA

Mendukung lumbung pangan nasional dan sentra industri kecil dan *food estate* di Merauke



PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN NASIONAL MERAUKE
(Inpres 9/2017 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat)

KONEKTIVITAS MENDUKUNG PARIWISATA

Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, Bandara Sam Ratulangi, dan jalan akses bandara mendukung Pariwisata Likupang



PALAPA RING

Tergelarnya Palapa Ring mendukung pemanfaatan teknologi digital di Industri Kecil dan Menengah (IKM) menuju *IKM Go-Digital*



INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Pembangunan waduk dan air baku di wilayah timur mendukung pengembangan KEK Sorong dan irigasi untuk perkebunan, persawahan, perikanan, dan tambak



VOLUME TOTAL
BENDUNGAN 196.85 Juta m3

IRIGASI 20377 Hektare

LISTRIK 6.56 MW

AIR BAKU 1.304 m3/detik

REDUKSI BANJIR 6.56 m3/detik



VISI 2 PRESIDEN:

“Pembangunan SDM dengan Menjamin Kesehatan Ibu Hamil, Kesehatan Bayi, Kesehatan Balita, Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Mengurangi *Stunting*, Kematian Ibu, Kematian Bayi...”

STRATEGI KEBIJAKAN

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak

1. Pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan
2. Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap
3. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil
4. Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

2. Percepatan penurunan stunting

Peningkatan efektivitas intervensi spesifik, serta perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi

3. Penguatan sistem kesehatan

1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
3. Pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan

PROGAM, KEGIATAN DAN PROYEK PRIORITAS

Program Prioritas:

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

1

Peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB, dan kesehatan reproduksi

- Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
- Peningkatan Kesehatan Reproduksi

2

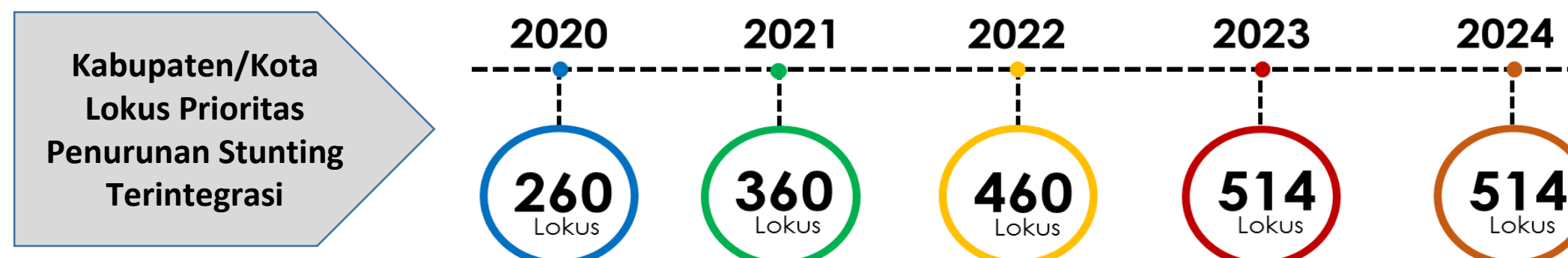
Percepatan perbaikan gizi masyarakat

- Penurunan *stunting*
- Konseling pengasuhan
- Akses air minum dan sanitasi layak

3

Penguatan Pelayanan Kesehatan

- Imunisasi
- Obat dan perbekalan kesehatan
- Pelatihan dan penugasan khusus tenaga kesehatan



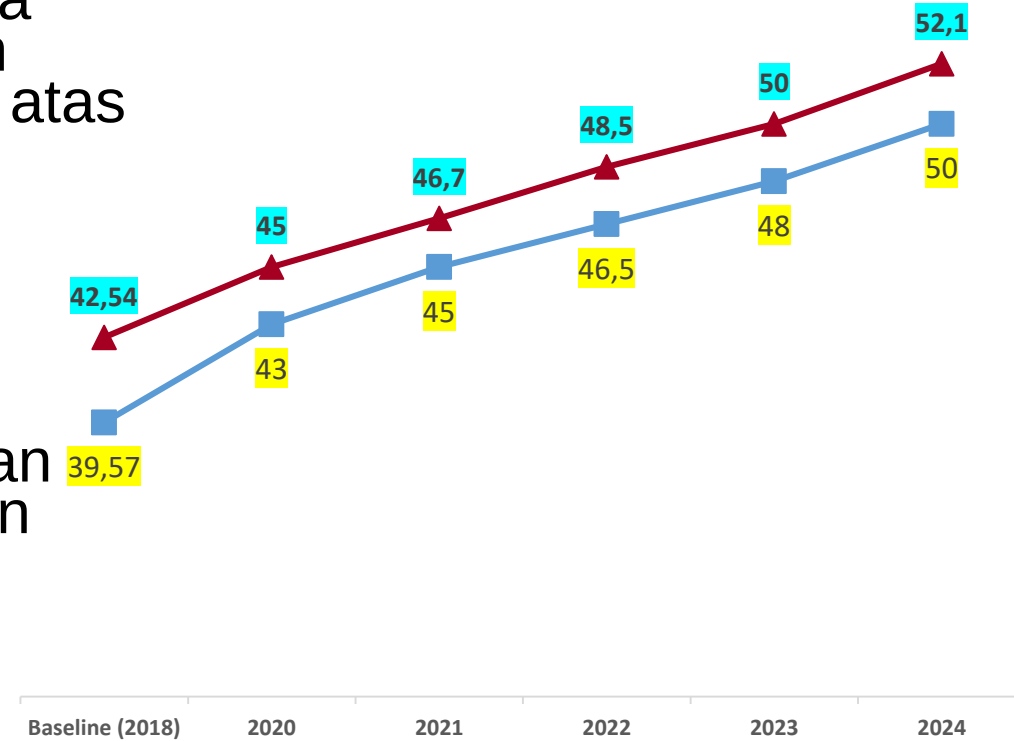


VISI 2 PRESIDEN:

“Membangun SDM dengan meningkatkan *vocational training, vocational school*”

Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)

Pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)



Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- Sistem insentif/regulasi untuk industri
- Pemetaan kebutuhan dan pengembangan bidang keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja

Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- Penyelarasan kurikulum, model pembelajaran, prodi sesuai kebutuhan industri;
- *dual TVET, teaching factory* dan pemagangan;
- Penguatan *softskills* dan pembelajaran bahasa asing;
- kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren;
- pemagangan guru/instruktur di industri, instruktur/praktisi dari industri

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri

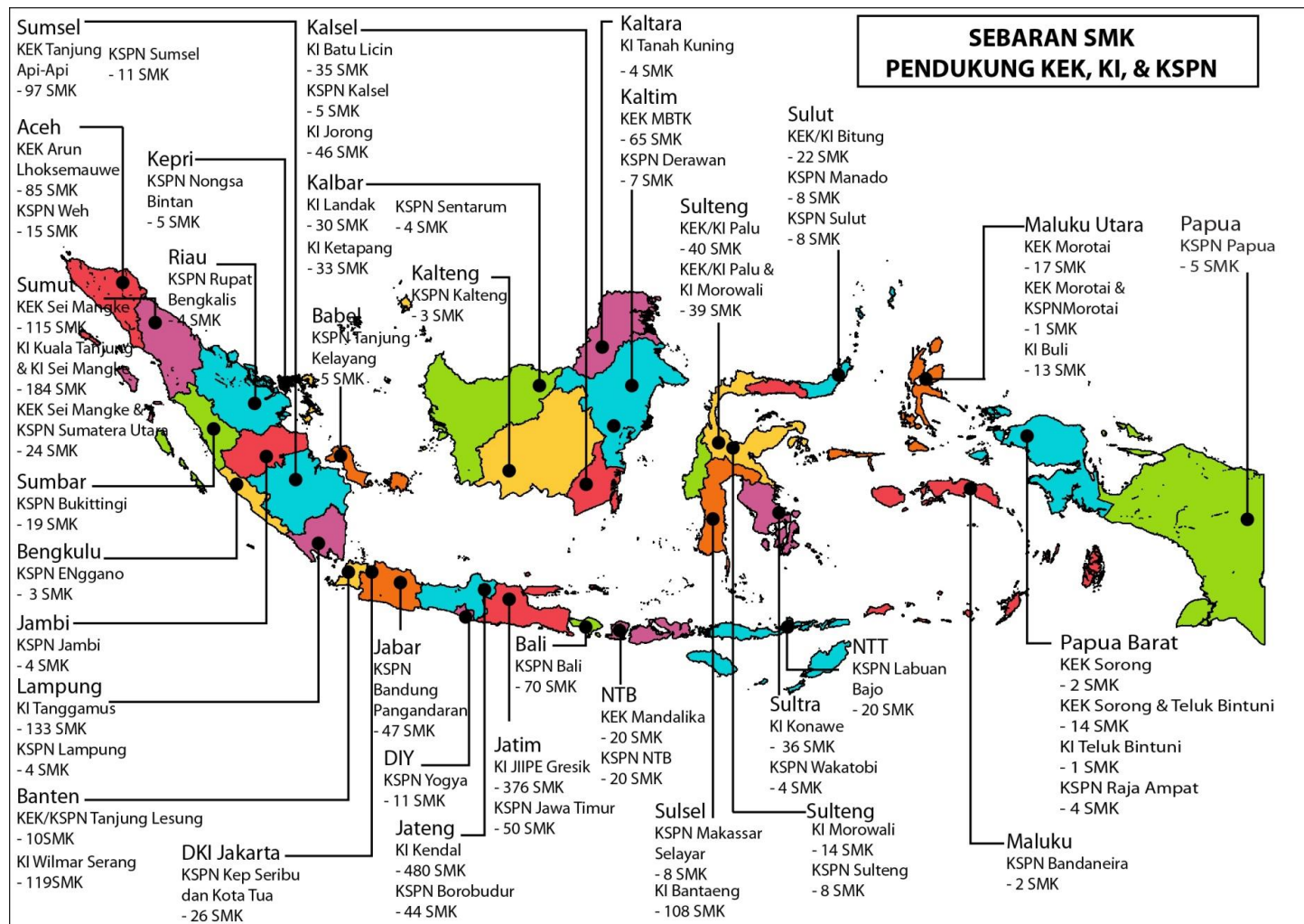
Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- Pengendalian satuan pendidikan dan program studi vokasi baru
- Peningkatan akreditasi
- Skema pendanaan peningkatan keahlian
- Fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/*teaching factory/teaching industry*
- Pembentukan Komite TVET

Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi

- Standar kompetensi berdasarkan okupasi yang mengacu standar internasional, dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor
- Penguatan lembaga sertifikasi profesi

SEBARAN SMK PENDUKUNG KEK, KI, & KSPN





VISI 3 PRESIDEN:

“Mengundang Investasi yang Seluas-luasnya untuk Membuka Lapangan Pekerjaan...Memangkas Hambatan Investasi, Perizinan yang Lambat, Pungli...”



1 Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi

- Kegiatan terkait : Rencana Aksi Peningkatan Peringkat EODB, Koordinasi Kebijakan Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Daya Saing Nasional,
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi, PTSP Prov DKI, PTSP Kota Surabaya
- Kegiatan terkait : Penyederhanaan Perizinan yang menghambat investasi, Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi, PTSP Daerah, Kemendagri



3 Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif

- Kegiatan terkait : Penataan regulasi ketenagakerjaan
- K/L terkait : Kemenaker, Kemenko Perekonomian, Kemendagri



2 Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi

- Kegiatan terkait : Evaluasi dan Monitoring Implementasi Peraturan DNI
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait yang sektornya masuk dalam DNI
- Kegiatan terkait : Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (SPBTSE), Pengembangan SPBTSE, Implementasi SPBTSE, Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi sesuai PP 24 Tahun 2018 tentang Kemudahan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik PTSP daerah, Kemendagri
- Kegiatan terkait : Pemanfaatan tax holiday tax allowance
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, K/L terkait perizinan investasi



VISI 4 PRESIDEN:

“Mereformasi Birokrasi...Reformasi Struktural Agar Lembaga Semakin Sederhana, Semakin *Simple*, Semakin Lincah, Mengubah *Mindset*,...Kecepatan Melayani, Kecepatan Memberi Izin...”



Arahan Presiden:

1. Penyederhaan perizinan
2. Penataan struktur kelembagaan birokrasi

Akar Permasalahan Pembangunan:

Iklim investasi dan ekspor yang belum kondusif disebabkan oleh regulasi dan kebijakan.



Hasil *Growth Diagnostic*:

Kualitas institusi rendah

1. Korupsi tinggi dan birokrasi tidak efisien
2. Lemahnya koordinasi antarkebijakan

Arah Kebijakan:



Penerapan *e-service* pada sektor pelayanan perizinan



Perluasan pelayanan terpadu pada sektor perizinan



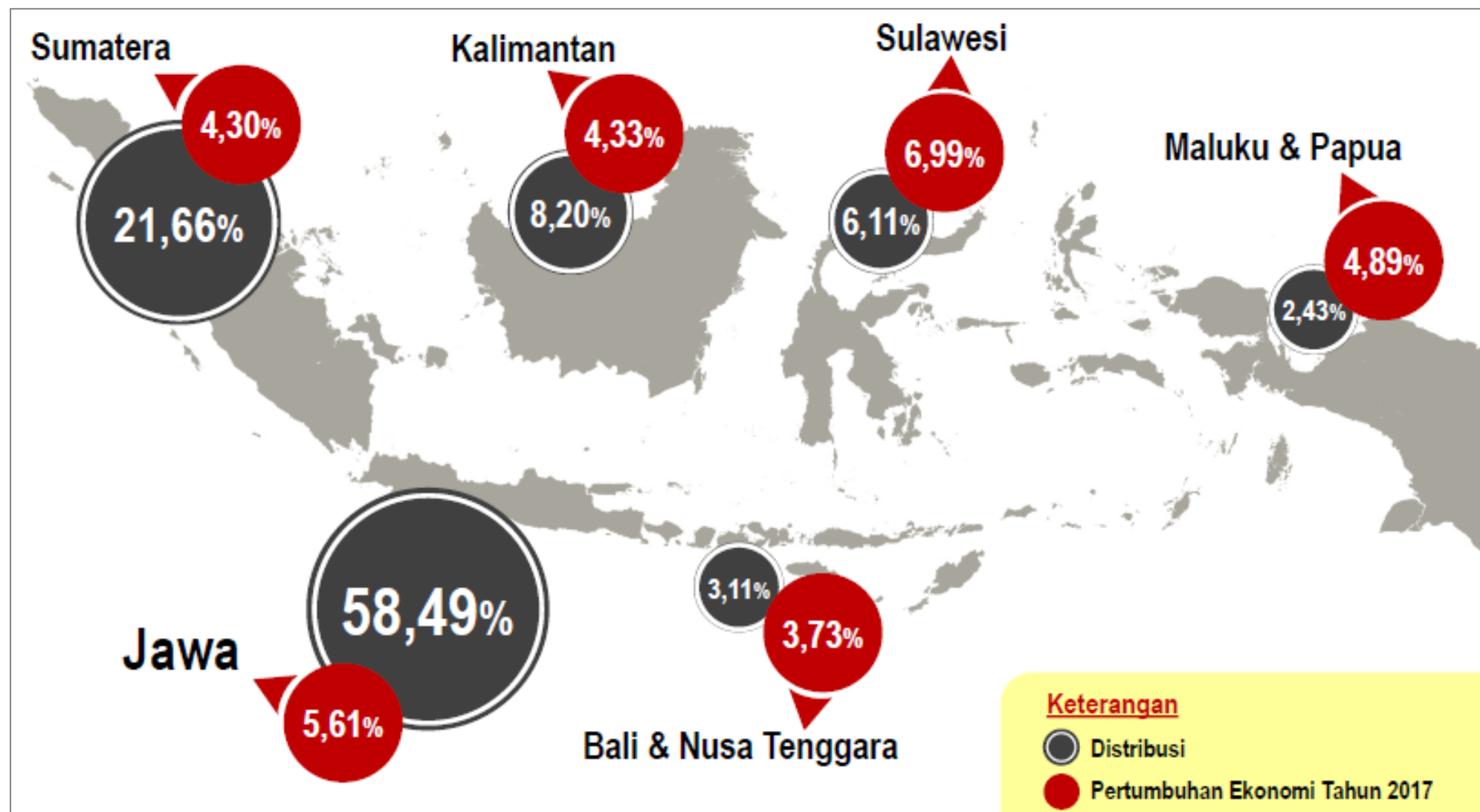
Pembangunan Zona Integritas pada unit pelayanan perizinan



Penataan koordinasi K/L yang menangani perizinan sektoral

Pemindahan Ibu Kota mendorong pemerataan ke luar Jawa dan mengubah *mindset* Java Centris

Struktur Perekonomian Indonesia secara Spasial 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Keunggulan:

- + Mengurangi beban Jabodetabek dan pulau Jawa
- + Memberikan *equal* akses bagi seluruh wilayah NKRI
- + Mendorong pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah, Contoh: Brasillia (Brazil); Sejong (Korsel); Naypyidyaw (Myanmar); Astana (Kazakhstan);
- + Merubah *mindset* orientasi pembangunan dari Java Centris ke Indonesia Centris
- + Ketersediaan lahan luas, dapat Membangun Ibu Kota, dengan konsep 60% wilayah terbangun dan 40% kawasan hijau kota.

Kelemahan:

- Membutuhkan biaya yang cukup besar
- Dalam jangka pendek, kemungkinan sebagian keluarga ASN Pusat akan tetap di Jakarta